

**POLA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM
PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN
(Studi di Kabupaten Pringsewu)**

Oleh

AYUB NURHIDATULLAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

POLA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (STUDI DI KABUPATEN PRINGSEWU)

Oleh

AYUB NURHIDATULLAH

Pemerintah desa memegang peran strategis dalam mendorong pembangunan lokal. Sebagaimana tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang berbeda di setiap desa, keberhasilan pembangunan desa menunjukkan variasi yang signifikan. Perbedaan capaian IDM ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dan sumber daya yang tersedia, tetapi juga oleh pola kepemimpinan kepala desa serta heterogenitas perilaku pengikutnya. Dalam konteks ini, kepemimpinan situasional menjadi faktor determinan dalam mengakomodasi karakteristik sosial dan kesiapan sumber daya manusia di masing-masing desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pola kepemimpinan kepala desa berkontribusi terhadap capaian IDM, dengan mempertimbangkan dinamika perilaku pengikut di tingkat pekon. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods, dengan data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei dan dianalisis menggunakan metode statistik, serta data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan delegatif berkorelasi positif dengan peningkatan IDM, terutama di desa-desa dengan kapasitas sumber daya manusia yang tinggi. Sebaliknya, di desa dengan indeks pembangunan rendah, pendekatan kepemimpinan direktif dan konsultatif lebih dominan. Temuan ini menegaskan bahwa fleksibilitas kepemimpinan situasional menjadi faktor esensial dalam pembangunan desa. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan kepemimpinan berbasis situasional bagi kepala desa, guna mengoptimalkan pencapaian IDM secara lebih merata di Kabupaten Pringsewu.

.Kata Kunci : Kepemimpinan Situasional, Indeks Desa Membangun, Pemerintahan Desa, Kabupaten Pringsewu

Abstract

***SITUATIONAL LEADERSHIP PATTERNS IN IMPROVING
THE VILLAGE DEVELOPMENT INDEX
(A STUDY IN PRINGSEWU REGENCY)***

By

AYUB NURHIDATULLAH

The village government plays a strategic role in promoting local development. However, the success of village development exhibits significant variation, as reflected in the differing Indeks Desa Membangun (IDM) scores across villages. These disparities are not solely influenced by policies and available resources but are also shaped by the leadership style of the village head and the heterogeneity of follower behavior. In this context, situational leadership emerges as a key factor in accommodating the social characteristics and human resource readiness of each village. This study aims to analyze how village head leadership styles contribute to IDM achievements, considering the dynamics of follower behavior at the pekon level. This research adopts a mixed-methods approach, where quantitative data was collected through surveys and analyzed using statistical methods, while qualitative data was obtained through in-depth interviews and observations. The findings indicate that delegative leadership correlates positively with IDM improvement, particularly in villages with high human resource capacity and active community participation. Conversely, in villages with lower development indices, directive and consultative leadership styles are more prevalent. These findings highlight that leadership flexibility is essential for effective village development. The study underscores the need for situational leadership training for village heads to optimize IDM achievements more equitably across Kabupaten Pringsewu.

Keywords : Situational Leadership, Village Development Index, Village Governance, Pringsewu Regency.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **POLA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DALAM
PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN
(STUDI DI KABUPATEN PRINGSEWU)**

Nama Mahasiswa : **Ayub Nurhidatullah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816021058**

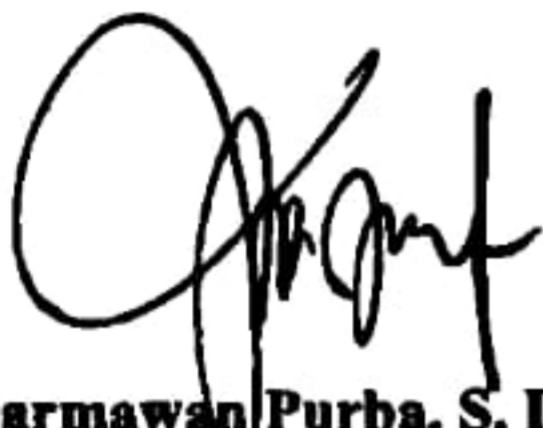
Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Darmawan Purba, S. IP, M. IP
NIP. 1988092320 1903 1 011



Goestyari Kurnia Amantha, S. IP, M. IP
NIP. 19911004202 3212 046

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Tabah Matyanah

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Darmawan Purba, S. IP, M. IP.

Sekretaris : Goestyari K. Amantha, S. IP, M. IP

Penguji Utama : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



**2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

NIP 1969110320 0112 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Ayub Nurhidatullah
NPM 2116021037

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ayub Nurhidatullah, dilahirkan di Lampung pada tanggal 6 Mei 2002. Peneliti merupakan putra pertama dari 3 bersaudara dari Ibu Sorta Septiana Sirat dan Ayah Samiran Sukirno. Peneliti memiliki dua orang adik bernama Zefanya Septiani dan Andrian Wijaya. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-Kanak

(TK) Taruna Bakti Kota Depok yang diselesaikan tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDK Pondok Daun Kota Depok tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPK Pondok Daun Kota Depok pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAK Pondok Daun pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 Peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung.

Pada saat melaksanakan Studi Ilmu Pemerintahan, penulis terlibat dalam beberapa kegiatan baik kegiatan penulisan maupun kegiatan sosial yang berkaitan dengan keilmuan yang penulis sedang jalani, yaitu :

1. Organisasi :

- a. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung Tahun 2021
- b. Kepala Departemen Pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Lampung Tahun 2022
- c. Tim Peneliti di Citra Research Center (CRC) Tahun 2023

- d. Anggota Divisi Penelitian Pengembangan di Perkumpulan Masyarakat Untuk Demokrasi Berkemajuan (PERMADEMA) Tahun 2024

2. Riset & Akademik

- a. Inovasi terbaik ke-6 pada Kompetisi PLN Inovation & Competition in Electricity (PLN ICE) Tahun 2023, dengan judul “EkoVisata : Smart Eco Tourism in Harapan Jaya Village, Pesawaran Regency”.
- b. Paper terbaik pada tema “*Regenerative Tourism*” pada Geo Tourims International Conference (GTIC) Politeknik Pariwisata Medan Tahun 2023, dengan judul “Harmony of Blue Sea and Green Forest : Embracing The Piil Pesenggiri”
- c. Presentasi Paper Terbaik pada *Symposium of Literature, Culture, and Communication* (SYLECTION) Universitas Ahmad Dahlan 2024, dengan judul “Multi-level policy Design in Bandar Lampung City Flood Management:.
- d. Anggota Kelompok Kerja Aksi Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung, dalam pengembangan “Learning Management System (LMS) 2.0”.

3. Tim Kajian Akademik

- a. Kajian Faktor yang Mempengaruhi Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak serta Strategi Penanggulangannya di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023
- b. Kajian Optimalisasi PAD Sektor Perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023

- c. Kajian Kebutuhan Infrastruktur Minimal untuk Menunjang Peningkatan PAD dalam Sektor Perhubungan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023
- d. Kajian Pembentukan Kampung Persiapan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah – Pemekaran Kampung Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023
- e. Kajian Strategi Inovasi Kebijakan Peningkatan PAD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024
- f. Kajian Strategis Akselerasi IPM Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024
- g. Kajian Strategis Budaya Lokal Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

4. Politik

- a. Tim Strategis Pemenangan Caleg DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor Urut 3. Ahmad Arly Pratama Thomas, S.E Tahun 2024.
- b. Tim Marketing, Komunikasi dan Media Sosial Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, Hi. Bambang Iman Santoso, dan M. Rafieq Adi Pradana

Demikian aktivitas sejak rentang tahun 2021 hingga 2024. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri, untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdikan.

MOTTO

“For the Greater Good!”

(Nurhidatullah)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk ...

Emak dan Abah tercinta

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasmu demi membesarkan seonggok daging ini menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pola Kepemimpinan Situasional dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun (Studi di Kabupaten Pringsewu)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Tulang Darmawan Purba, S.IP, M.IP. Selaku Mentor, Paman Ideologis, dan Dosen Pembimbing Utama. Mauliate Tulang ! semoga Allah SWT selalu melindungi langkah Tulang dan selalu diberikan kesehatan untuk menciptakan keajaiban di Bumi Ruwa Jurai.
8. Ibu Goestyari Kurnia Amantha, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang luar biasa yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi Peneliti sehingga saat ini skripsi peneliti terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak Ibu, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.
9. Babeh Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Dosen Penguji. Terima kasih Babeh, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan, rejeki, dan kesabaran yang berlimpah.
10. Alm. Bapak Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ayah Ideologis dan Pembimbing Akademik (PA). Abah, hatur nuhun, Al Fatihah untuk Abah.
11. Abah Dr. Agus Muhammad Septiana, S.IP, M.H. Terimakasih untuk segala kesempatan berkarya dan berkeaktivitas di Lampung.
12. Abang Bendi Juantara, S.IP, M.A. selaku Mentor selama berkuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
13. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Peneliti kepada bapak dan ibu semua. Peneliti sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Peneliti.
14. Staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pringsewu, yang telah membantu perizinan dan pendistribusian angket penelitian.
15. Kedua Orangtua tercinta, Mama Butet Sirat dan Abah Samiran Sukirno. Terimakasih untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan peneliti insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua semua tetesan keringat dan do'a yang tak terhenti terpanjang untuk membesarkan putramu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai harapan Mama dan Abah. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah

keluar atas tindakanku. Berjuta terimakasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Ibu dan Ayah, serta ilmu yang ku dapat dari pendidikan bisa bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah bagi Ibu dan Ayah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Mama dan Abah berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Mama dan Abah tercinta.

16. Untuk Ajeng Rahayu., Terima kasih telah menemani dan kebersamaan dalam segala hal dari awal hingga akhir. Terima kasih atas segala motivasi yang telah diberikan. Maaf atas segala hal yang belum dapat dipenuhi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dan semoga kita bisa sampai kesana ya.
17. Untuk keluarga besar PERMADEMA dan CRC, Ayah Tiyas Apriza, S.IP, M.IP, Kakak Harjuno Saputro S.IP, M.IP, Lae Robi Apriadi Harahap, S.IP, Kakak Nendy Aji Pangestu, S.IP, Adinda Alfun Fuadi Alfadly,, Adinda Marsel Rafi Pratama, Adinda Rizki Herliansyah, dan Adinda Ahmad Mariza. Terima kasih atas semangat dan pengalaman yang selalu ditularkan oleh abang-abang dan adik-adik yang telah menjadi bagian dari proses pendewasaan untuk penulis dalam menyelesaikan proses yang sedang dijalani.
18. Untuk keluarga besar Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Februari 2025

Peneliti

Ayub Nurhidatullah

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	i
DATAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Analisis.....	15
2.1.1 Metode Campuran (Mixed Methods).....	15
2.2 Tinjauan Pemerintahan Desa.....	17
2.2.1 Pemerintahan Desa.....	17
2.2.2 Kewenangan Desa.....	18

2.3 Tinjauan Kepemimpinan Pemerintahan	22
2.3.1 Konsep Kepemimpinan	22
2.3.2 Kepemimpinan Pemerintahan	23
2.3.3 Fungsi Kepemimpinan Pemerintahan	25
2.4 Tinjauan Gaya Kepemimpinan Pemerintahan Situasional.....	26
2.4.1 Gaya Kepemimpinan.....	26
2.4.2 Kepemimpinan Pemerintahan Situasional	27
2.5 Tinjauan Perilaku Pengikut (Folowership)	30
2.5.1 Pengertian Perilaku Pengikut	30
2.5.2 Relasi Pemimpin dan Pengikut	31
2.5.3 Tipologi Perilaku Pengikut.....	32
2.5.4 Implikasi Perilaku Pengikut Terhadap Kepemimpinan.....	34
2.6 Tinjauan Indeks Desa Membangun.....	35
2.6.1 Indeks Desa Membangun.....	35
2.6.2 Indikator Indeks Desa Membangun	36
2.7 Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Tipe Penelitian.....	45
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Kerangka Penelitian	49
3.4 Fokus Penelitian.....	52
3.5 Penentuan Informan	52
3.6 Jenis Data	53
3.7 Teknik Pengumpulan Data	53
3.8 Teknik Pengolahan Data.....	55
3.9 Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	60
4.1.1 Kabupaten Pringsewu.....	60
4.1.2 Primary Sampling Unit	66

4.2 Gambaran Umum Desa Penelitian	68
4.2.1 Gambaran Umum Pekon di Kecamatan Adiluwih	68
4.2.2 Gambaran Umum Desa/Pekon di Kecamatan Ambarawa	70
4.2.3 Gambaran Umum Pekon di Kecamatan Banyumas	72
4.2.4 Gambaran Umum Pekon di Kecamatan Gading Rejo.....	74
4.2.5 Gambaran Umum Pekon di Kecamatan Pardasuka	77
4.2.6 Gambaran Umum Pekon di Kecamatan Pagelaran	78
4.2.7 Gambaran Umum Pekon di Kecamatan Pagelaran Utara	81
4.2.8 Gambaran Umum Pekon di Kecamatan Pringsewu	82
4.2.9 Gambaran Umum Pekon di Kecamatan Sukoharjo	85
4.3 Hasil Penelitian	87
4.3.1 Analisis Realibilitas dan Validitas Data	87
4.3.2 Analisis Pengaruh Kepemimpinan Situasional Terhadap Perilaku Pengikut dan Kinerja	93
4.3.1 Analisis Pengaruh Perilaku Pengikut Terhadap Kinerja Aparatur Pekon	95
4.3.2 Analisis Pengaruh Perilaku Pengikut dan Kinerja Aparatur Pekon Terhadap Indeks Desa Membangun.....	96
4.3.3 Analisis Kepemimpinan Situasional Pemerintah Pekon di Kabupaten Pringsewu.....	97
4.3.4 Pemetaan Kepemimpinan Situasional Pekon di Kabupaten Pringsewu	100
4.3.5 Pola Kepemimpinan Situasional Kabupaten Pringsewu.....	101
4.3.5.1 Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa	101
4.3.5.2 Pekon Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih.....	103
4.3.5.3 Pekon Banyu Urip, Kecamatan Banyumas	104
4.3.5.4 Pekon Bumi Arum, Kecamatan Pringsewu.....	106
4.3.5.5 Pekon Candi Retno, Kecamatan Pagelaran.....	108
4.3.5.6 Pekon Fajar Agung, Kecamatan Pringsewu	110
4.3.5.7 Pekon Gading Rejo Timur, Gading Rejo	112
4.3.5.8 Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran	114
4.3.5.9 Pekon Jati Agung, Kecamatan Ambarawa	116
4.3.5.10 Pekon Keputaran, Kecamatan Sukoharjo.....	118
4.3.5.11 Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo.....	120

4.3.5.12 Pekon Kutawaringin, Kecamatan Adiluwih.....	122
4.3.5.13 Pekon Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran.....	124
4.3.5.14 Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu.....	126
4.3.5.15 Pekon Sidodadi, Kecamatan Pardasuka.....	128
4.3.5.16 Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu.....	130
4.3.5.17 Pekon Siliwangi, Kecamatan Sukoharjo.....	132
4.3.5.18 Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo.....	134
4.3.5.19 Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka.....	136
4.3.5.20 Pekon Tegalsari, Kecamatan Gading Rejo.....	141
4.3.5.21 Pekon Way Kunir, Kecamatan Pagelaran Utara.....	141
4.3.5.22 Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo.....	143
4.3.6 Distribusi Kepemimpinan Situasional Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu	145
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	148
5.1 Kesimpulan	148
5.2 Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....	151

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.1 Indikator dan Domain Indeks Desa Membangun	37
Tabel 3.1 Primary Sampling Unit	46
Tabel 3.2 Lokasi Penelitian.....	46
Tabel 3.3 Indikator Penelitian.....	47
Tabel 3.4 Informan Penelitian.....	50
Tabel 4.1 Wilayah Perbatasan Kabupaten Pringsewu.....	58
Tabel 4.2 Daerah Administratif Kabupaten Pringsewu	59
Tabel 4.3 Pertumbuhan Indeks Desa Membangun Perkecamatan.....	62
Tabel 4.4 Primary Sampling Unit	64
Tabel 4.5 Lokasi Penelitian.....	65
Tabel 4.6 Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk	66
Tabel 4.7 Kependudukan	67
Tabel 4.8 Pemerintahan Desa.....	67
Tabel 4.9 Skor Indeks Desa Membangun	67
Tabel 4.10 Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk	68
Tabel 4.11 Kependudukan	69
Tabel 4.12 Pemerintahan Desa.....	69
Tabel 4.13 Skor Indeks Desa Membangun	69
Tabel 4.14 Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk	70
Tabel 4.15 Kependudukan	71
Tabel 4.16 Pemerintahan Desa.....	71
Tabel 4.17 Skor Indeks Desa Membangun	71
Tabel 4.18 Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk	72
Tabel 4.19 Kependudukan	73

Tabel 4.20 Pemerintahan Desa.....	73
Tabel 4.21 Skor Indeks Desa Membangun	74
Tabel 4.22 Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk	75
Tabel 4.23 Kependudukan	75
Tabel 4.24 Pemerintahan Desa.....	76
Tabel 4.25 Skor Indeks Desa Membangun	76
Tabel 4.26 Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk	77
Tabel 4.27 Kependudukan	77
Tabel 4.28 Pemerintahan Desa.....	78
Tabel 4.29 Skor Indeks Desa Membangun	78
Tabel 4.30 Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk	79
Tabel 4.31 Kependudukan	79
Tabel 4.32 Pemerintahan Desa.....	80
Tabel 4.33 Skor Indeks Desa Membangun	80
Tabel 4.34 Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk	81
Tabel 4.35 Kependudukan	81
Tabel 4.36 Pemerintahan Desa.....	82
Tabel 4.37 Skor Indeks Desa Membangun	82
Tabel 4.38 Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk	83
Tabel 4.39 Kependudukan	84
Tabel 4.40 Pemerintahan Desa.....	84
Tabel 4.41 Skor Indeks Desa Membangun	85
Tabel 4.42 Hasil Uji Construct Reliability and Validity.....	87
Tabel 4.43 Path Coefficients Kepemimpinan Situasional.....	92
Tabel 4.44 Path Coefficients Perilaku Pengikut dan Kinerja.....	93
Tabel 4.45 Path Coefficients Indeks Desa Membangun	94
Tabel 4.46 Hasil Analisis Kepemimpinan Situasional, Perilaku Pengikut, dan Capaian IDM di Kabupaten Pringsewu.....	95
Tabel 4.47 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Ambarawa	99
Tabel 4.48 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Bandung Baru.....	101
Tabel 4.49 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Banyu Urip	102
Tabel 4.50 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Bumi Arum.....	104

Tabel 4.51 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Candi Retno.....	106
Tabel 4.52 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Fajar Agung.....	108
Tabel 4.53 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Gading Rejo Timur.....	110
Tabel 4.54 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Gumuk Mas	112
Tabel 4.55 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Jati Agung.....	114
Tabel 4.56 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Keputaran	116
Tabel 4.57 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Klaten	118
Tabel 4.58 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Kutawaringin	120
Tabel 4.59 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Pasir Ukir.....	122
Tabel 4.60 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Podosari	124
Tabel 4.61 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Sidodadi.....	126
Tabel 4.62 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Sidoharjo	128
Tabel 4.63 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Siliwangi.....	130
Tabel 4.64 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Sukoharjo III.....	132
Tabel 4.65 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Sukorejo.....	134
Tabel 4.66 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Tegalsari	137
Tabel 4.67 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Way Kunir	139
Tabel 4.68 Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Yogyakarta	141

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Kuadran Gaya Kepemimpinan Situasional	5
Gambar 2.1 Alur Model Penelitian Campuran Sequential Explanatory	15
Gambar 2.2 Kuadran Gaya Kepemimpinan Situasional	28
Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	42
Gambar 3.1 Desain Model Sequential Explanatory.....	44
Gambar 4.1 Peta Kuadran Kepemimpinan Situasional Kabupaten Pringsewu.....	98
Gambar 4.2 Peta Kepemimpinan Situasional Pekon di Kabupaten Pringsewu ..	144

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan IDM Kabupaten Pringsewu	7
Grafik 3.1 Model Penelitian.....	47
Grafik 4.1 Pertumbuhan Indeks Desa Membangun Kabupaten Pringsewu.....	63
Grafik 4.2 Hasil Analisis Hubungan Antar Variabel	86
Grafik 4.3 Hasil Uji Cronbach's Alpha	88
Grafik 4.4 Hasil Uji Composite Reliability.....	89
Grafik 4.5 Hasil Uji Average Variance Extracted	90
Grafik 4.6 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Ambarawa.....	100
Grafik 4.7 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Bandung Baru	101
Grafik 4.8 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Bandung Baru	103
Grafik 4.9 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Bandung Baru	105
Grafik 4.10 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Candi Retno	107
Grafik 4.11 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Fajar Agung	109
Grafik 4.12 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Gading Rejo Timur	111
Grafik 4.13 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Gumuk Mas	113
Grafik 4.14 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Jati Agung.....	115
Grafik 4.15 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Keputaran.....	117
Grafik 4.16 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Klaten.....	119
Grafik 4.17 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Kutawaringin	121
Grafik 4.18 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Pasir Ukir	123
Grafik 4.19 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Podosari	125
Grafik 4.20 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Sidodadi	127
Grafik 4.21 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Sidoharjo.....	129
Grafik 4.22 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Siliwangi.....	131
Grafik 4.23 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Pardasuka.....	135

Grafik 4.24 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Tegalsari	138
Grafik 4.25 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Way Kunir	140
Grafik 4.26 Grafik Pola Kepemimpinan Situasional Pekon Klaten.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sejak era Orde Baru hingga masa Reformasi, pembangunan nasional mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur. Fokus utama pembangunan nasional adalah menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini diwujudkan melalui program-program pembangunan yang disusun secara terencana dan berkesinambungan, bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali masyarakat desa.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran vital dalam struktur masyarakat. Terdapat lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia, masing-masing memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pembangunan memerlukan patron humanis yang menjadikan peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai subjek dan objek utama pembangunan, serta senantiasa membangun keseimbangan dan keselarasan kehidupan mental dan fisik. baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, untuk menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur, kemajuan perlu didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi pembangunan nasional tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, namun juga di distribusikan ke daerah-daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan percepatan pembangunan dapat lebih merata dan sesuai dengan karakteristik daerah. Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pembangunannya, yang mencakup usaha untuk memaksimalkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Perubahan positif ini dapat dicapai melalui pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang direncanakan dan dikendalikan melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Otonomi daerah yang di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, kemudian diturunkan hingga ke tingkatan yang lebih kecil, yaitu pemerintahan desa, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memvalidasi kewenangan desa untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju pemerintahan desa yang mandiri, demokratis, dan partisipatif. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, karena desa adalah ujung tombak pembangunan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka kolaborasi masyarakat, investor, dan Pemerintah daerah. Dalam kerangka undang-undang ini, desa memiliki kewenangan yang lebih kuat dan fleksibel terkait perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dalam upaya percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan publik.

Salah satu inovasi yang lahir dari kebijakan ini adalah Indeks Desa Membangun (IDM), yang dirancang untuk mengakselerasi pembangunan desa. IDM menjadi alat evaluasi yang memungkinkan pemerintah untuk menilai kinerja desa berdasarkan indikator-indikator tertentu, seperti ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk mengukur kinerja desa dalam melaksanakan pembangunan. Indeks Desa Membangun (IDM) diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk menilai dan mengukur kemandirian serta kemajuan desa melalui berbagai aspek seperti ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta kepemimpinan dan tata kelola desa. Indeks Desa Membangun terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu:

1) Ketahanan Sosial

Meliputi ketersediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Desa dengan ketahanan sosial yang baik mampu menyediakan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

2) Ketahanan Ekonomi

Berkaitan dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi seperti pasar, permodalan, dan lapangan pekerjaan. Ketahanan ekonomi yang baik mencerminkan kemampuan desa untuk menyediakan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) Ketahanan Ekologi

Menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Desa yang memiliki ketahanan ekologi yang baik mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

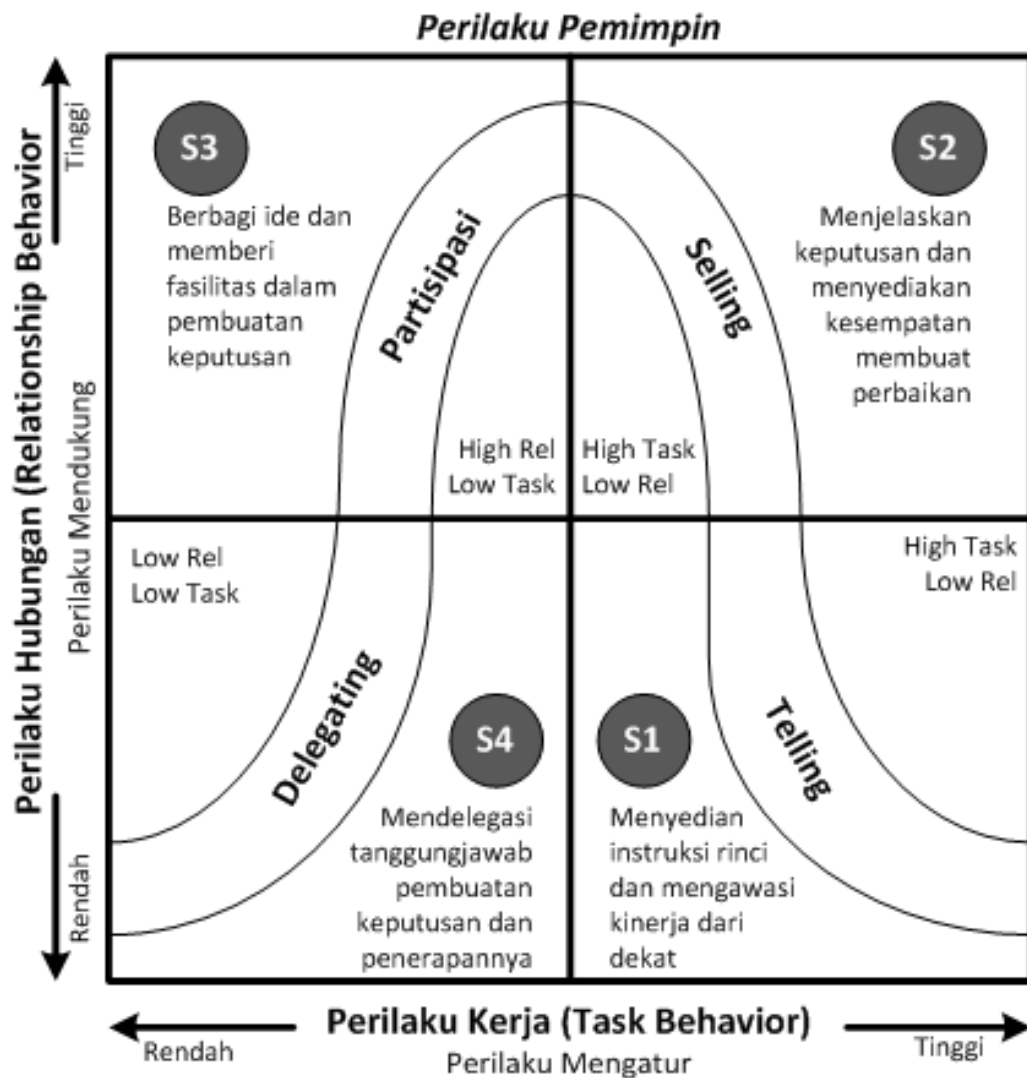
Masing-masing dimensi ini diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Keberhasilan desa dalam memenuhi indikator-indikator desa membangun

ini, sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala desa. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan situasional memainkan peran kunci dalam menentukan efektivitas kepala desa dalam mengelola sumber daya, memobilisasi masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan. Kepemimpinan situasional, yang dicirikan oleh kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan yang ada, dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan desa. Kepala desa yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dapat mengarahkan dan memotivasi perangkat desa serta masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Kepala desa yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan situasional dapat menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi dan kebutuhan spesifik desanya. Kepemimpinan situasional yang efektif melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi dengan baik, serta mengelola sumber daya secara efisien. Gaya kepemimpinan situasional pertama kali dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Model ini mengusulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Sebaliknya, efektivitas kepemimpinan tergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka dengan tingkat kematangan atau kesiapan pengikut mereka.

Teori kepemimpinan situasional menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi dan kebutuhan yang spesifik di setiap situasi. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa dengan gaya kepemimpinan situasional, adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat desa untuk mencapai hasil yang optimal. Gaya kepemimpinan situasional dapat dibagi menjadi empat kuadran utama, yaitu:

1. Gaya Mengarahkan (*Directing*): Pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan mengawasi pelaksanaan tugas secara ketat.
2. Gaya Membimbing (*Coaching*): Pemimpin memberikan bimbingan dan dukungan, serta mengawasi pelaksanaan tugas dengan lebih fleksibel.

3. Gaya Mendukung (*Supporting*): Pemimpin mendukung pengikut dalam pengambilan keputusan dan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pelaksanaan tugas.
4. Gaya Mendelegasikan (*Delegating*): Pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada pengikut untuk melaksanakan tugas dengan sedikit pengawasan



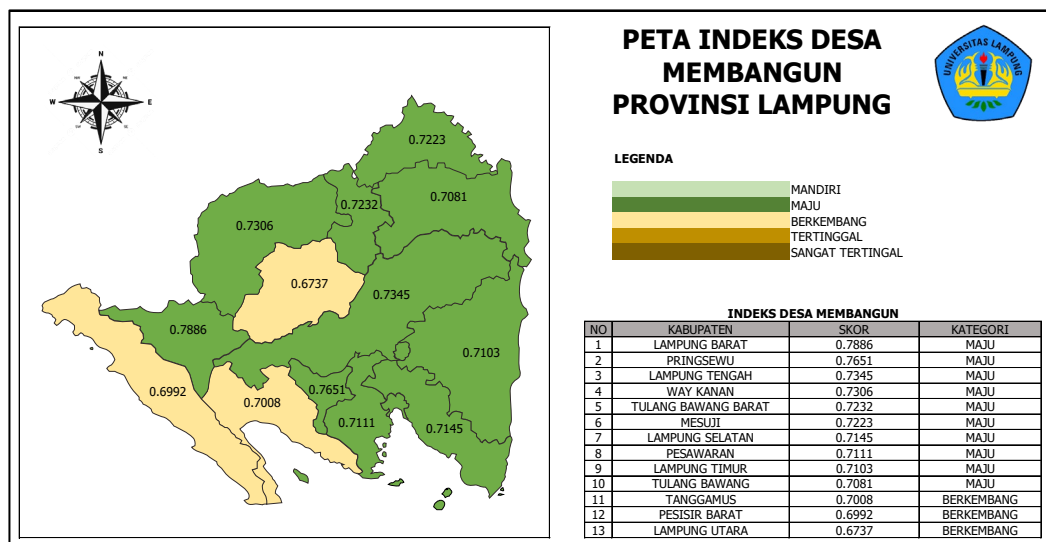
Gambar 1.1 Kuadran Gaya Kepemimpinan Situasional

Sumber: Hersey & Blanchard, 1996

Kepala desa yang menggunakan gaya kepemimpinan situasional mampu menyesuaikan pendekatannya berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Misalnya, dalam situasi krisis atau ketika ada program baru yang harus segera

diimplementasikan, gaya mengarahkan mungkin lebih efektif. Sebaliknya, dalam situasi di mana masyarakat desa sudah matang dan mandiri, gaya mendelegasikan dapat lebih sesuai. Gaya kepemimpinan situasional yang mendukung dan mendelegasikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kepala desa yang mampu memberikan otonomi dan kepercayaan kepada masyarakat cenderung melihat tingkat partisipasi dan keterlibatan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pembangunan.

Kemampuan Kepala Desa dalam menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi perangkat-perangkatnya, mampu membuat keputusan yang lebih efektif dan tepat waktu. Gaya membimbing dan mendukung, misalnya, dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari berbagai pihak, sehingga menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan diterima oleh semua pihak. Gaya kepemimpinan yang fleksibel memungkinkan kepala desa untuk mengelola sumber daya desa dengan lebih efisien. Misalnya, dalam situasi di mana sumber daya terbatas, gaya mengarahkan dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif.

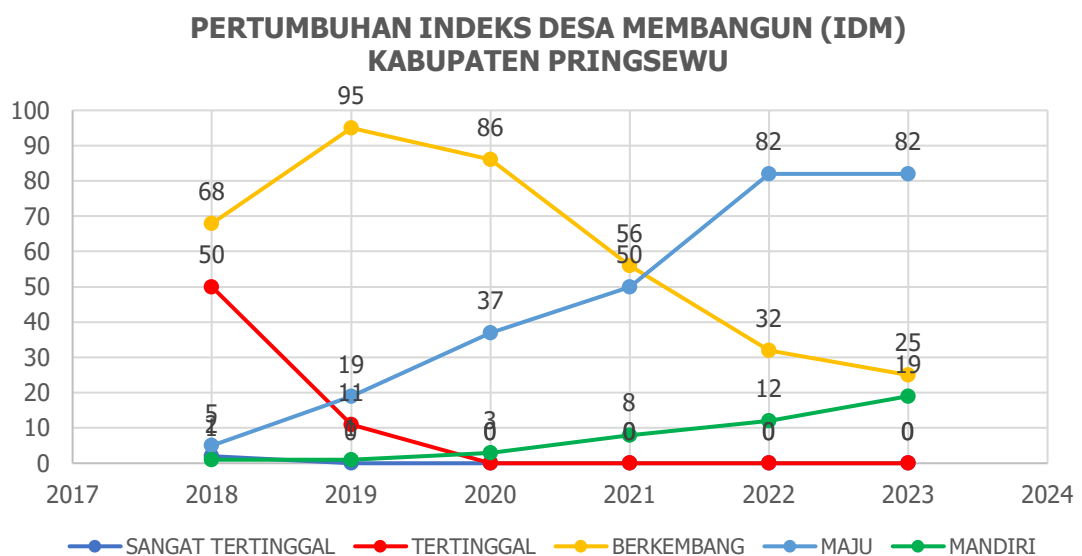


Gambar 1.2 Peta Indeks Membangun Provinsi Lampung Tahun 2023

Sumber: Kementerian Desa, *Diolah* kembali oleh Peneliti, 2024

Provinsi Lampung, memiliki 2.500 wilayah yang berstatus sebagai desa pekon, kampung, atau sebutan lainnya. Desa-desa tersebut tersebar ke dalam 13 Kabupaten yang terhampar dari pesisir di bagian selatan, hingga ke bagian utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Dari 13 kabupaten tersebut, 3 kabupaten dengan nilai Indeks Desa Membangun tertinggi di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Tengah.

Salah satu dari 3 kabupaten dengan capaian Indeks Desa Membangun tertinggi adalah Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang terletak di bagian selatan pulau Sumatera. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 9 kecamatan dengan 129 desa dan 2 kelurahan. Kabupaten Pringsewu memiliki luas wilayah sekitar 625 km² dengan topografi yang didominasi oleh lahan pertanian, menjadikannya salah satu daerah penghasil pertanian penting di Provinsi Lampung. Selain sektor pertanian, Pringsewu juga memiliki potensi dalam sektor pariwisata dan industri kecil, yang berkontribusi pada perekonomian daerah.



Grafik 1.1 Pertumbuhan IDM Kabupaten Pringsewu

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, *Diolah* kembali oleh peneliti, 2024

Berdasarkan data grafik diatas, diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren positif. Sejak tahun 2018, jumlah desa dalam kategori "Maju" meningkat dari 5 desa, menjadi 82 pada tahun 2022. Kemudian desa dalam kategori "Berkembang" menurun dari 95 pada tahun 2019 menjadi hanya 19 desa pada 2023. Kategori "Tertinggal" dan "Sangat Tertinggal" telah menghilang sejak 2021, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi keterbelakangan desa. Selain itu, desa dalam kategori "Mandiri" terus bertambah, dari 8 desa pada 2021 menjadi 12 desa pada 2023. Tren ini mencerminkan komitmen Kabupaten Pringsewu dalam mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan, menjadikannya konteks yang relevan untuk menganalisis peran kepemimpinan dan kebijakan dalam peningkatan IDM.

Keberhasilan pemerintah desa di Kabupaten Pringsewu menjadi topik yang menarik untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan situasional yang di ambil oleh kepala desa di Kabupaten Pringsewu, berhasil mengarahkan dan mengawasi ketika diperlukan, namun juga memberikan dukungan dan otonomi kepada masyarakat desa dalam situasi yang lebih stabil. Hal ini sesuai dengan teori Kepemimpinan situasional, yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard (1996), menekankan bahwa efektivitas pemimpin ditentukan oleh kemampuan mereka untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan pengikut. Dalam konteks pemerintahan desa, gaya ini memungkinkan kepala desa untuk mendelegasikan tanggung jawab dan memberikan otonomi kepada perangkat desa, sehingga mendorong inisiatif dan kreativitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Pada penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang relevan dengan penelitian ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Aisyah Septia Putri, Doris Febriyanti, dan Amaliatulwalidain	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Desa Sungai Kedukan	Kepemimpinan Kepala Desa di Sungai Kedukan telah menggunakan kepemimpinan Situasiona dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yaitu dengan menerapkan beberapa pendekatan yang diterapkan oleh kepala desa yaitu pendekatan Situasional yang paling dominan yang ditunjukkan oleh kepala desa yaitu <i>Telling</i> dan <i>Participating</i> , yang menjadikan kepemimpinan kepala desa Sungai Kedukan berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu.
Dian Anggradewi Setyabekti	Pengaruh Faktor- Faktor Kepemimpinan Situasional Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	Hasil analisis data menunjukkan secara silmultan faktor gaya kepemimpinan situasional yang terdiri dari direktif, konsultatif, partisipatif, delegatif berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro. Secara parsial faktor gaya kepemimpinan situasional yang terdiri dari direktif, konsultatif, partisipatif, delegatif berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro. Diantara faktor gaya kepemimpinan situasional yang terdiri dari direktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, yang paling berpengaruh dominan terhadap prestasi kerja pegawai adalah variabel gaya kepemimpinan direktif.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Slamet Hariyanto, Katan	<i>Situational Leadership Analysis Of Village Headman In Nglutung, Village Development, Sendang District, Tulungagung</i>	Kepemimpinan situasional dalam pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglutung Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Indikator partisipatif seharusnya warga yang terlibat tidak hanya memberikan bantuan tenaga saja, tetapi juga konsep, gagasan dan ide terhadap pengembangan dan pembangunan desa sangatlah dibutuhkan. Kualitas SDM yang rendah menjadi faktor penghambat kepemimpinan situasional.
Nurul Hidayah, Agus Suprojo	Pengaruh Kepimimpinan Situasional Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Dan Terciptanya <i>Good Governance</i>	kepemimpinan situasional dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,00. Kinerja pegawai dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata 2,85 dan kondisi <i>Good Governance</i> dalam kategori baik yaitu nilai rata-rata 2,84. Kepemimpinan situasional berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yaitu 1,914. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa dengan semakin baiknya gaya kepemimpinan maka kinerja pegawai akan mengalami peningkatan. Kepemimpinan situasional berpengaruh terhadap terciptanya <i>Good Governance</i> dengan nilai koefiein regresi yaitu sebesar 1,727. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya gaya kepemimpinan maka <i>Good Governance</i> akan semakin meningkat.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Intan Kumalasari	Kepemimpinan Kepala Desa Ciamis Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)	Pola Kepemimpinan yang di gunakan di Desa Ciamis yang peneliti analisis bahwa tidak ada dukungan dan pengarahan yang jelas dari kepala desa dalam memberikan arahan dan perintah yang berkaitan dengan pembangunan Desa Ciamis. Perilaku pengikut atau aparatur desa dan masyarakat yang terjadi di Desa Ciamis bahwa mereka tidak mau dan tidak mampu. Perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan rendah pengarahan dalam kepemimpinan Situasional disebut dengan Delegasi.

Berdasarkan sumber data penelitian sebelumnya, kelima penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan penelitian sebelumnya berada pada pembahasan bagaimana kepemimpinan situasional kepala desa mempengaruhi keberhasilan desa dalam meraih skor Indeks Desa Membangun (IDM). Pada penelitian pertama, diketahui Kepemimpinan situasional diterapkan dengan pendekatan "*Telling*" dan "*Participating*," yang efektif meningkatkan kinerja pelayanan publik di desa tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan situasional yang tepat dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa, yang relevan dengan tujuan penelitian untuk mengukur pengaruh kepemimpinan terhadap capaian IDM. Pada penelitian kedua, diketahui Gaya kepemimpinan direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa berbagai gaya kepemimpinan situasional dapat mempengaruhi prestasi kerja, yang bisa diterapkan dalam konteks pengelolaan desa dan capaian IDM.

Pada penelitian ketiga, diketahui kepemimpinan situasional dengan indikator partisipatif sangat penting untuk pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan situasional yang melibatkan masyarakat secara partisipatif sangat efektif dalam pembangunan desa, mendukung penelitian yang akan menggali bagaimana gaya kepemimpinan ini mempengaruhi IDM. Pada penelitian keempat, diketahui bahwa kepala desa yang menggunakan gaya kepemimpinan situasional, terutama dengan mengutamakan partisipasi masyarakat, mampu mendorong keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi warga yang luas dan beragam meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan. Hal ini menyoroti pentingnya kepemimpinan kepala desa dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat demi keberhasilan pembangunan desa. Pada penelitian kelima, diketahui bahwa rendahnya dukungan dan pengarahan dari kepala desa mempengaruhi pembangunan desa secara negatif. Kepemimpinan yang tidak efektif menghambat kemajuan desa. Temuan ini relevan dengan penelitian karena menyoroti dampak negatif dari gaya kepemimpinan yang tidak efektif, serta mengevaluasi bagaimana gaya kepemimpinan yang berbeda dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan desa, khususnya melalui skor IDM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai gaya kepemimpinan situasional yang diterapkan oleh kepala desa di Kabupaten Pringsewu dan bagaimana gaya kepemimpinan tersebut mempengaruhi keberhasilan desa dalam meraih skor IDM tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran kepemimpinan dalam pembangunan desa dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada kepala desa dan perangkat desa yang berada di sejumlah desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan situasional kepala desa dan capaian IDM di desa-desa tersebut.

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel dan analisis statistik yang menggambarkan hubungan antara gaya kepemimpinan situasional dan capaian IDM di desa-desa yang diteliti. Hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas gaya kepemimpinan situasional dalam konteks pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik kepemimpinan desa. Output dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan desa dalam meningkatkan kinerja dan capaian pembangunan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan situasional kepala desa mempengaruhi efektivitas tata kelola desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa?
2. Sejauh mana gaya kepemimpinan situasional kepala desa berkontribusi terhadap perolehan skor IDM yang tinggi?
3. Faktor-faktor spesifik apa dalam kepemimpinan situasional yang paling signifikan dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi gaya kepemimpinan situasional Kepala Desa di Kabupaten Pringsewu
2. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tata kelola desa
3. Mengevaluasi dampak kepemimpinan situasional terhadap pencapaian Indeks Desa Membangun

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka dapat di ketahui manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan tentang kajian Kepemimpinan Pemerintahan khususnya dalam aspek Kepemimpinan Situasional Kepala Desa. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa seharusnya di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang dimiliki desa, sehingga dapat melahirkan kebijakan yang tepat dan sesuai, sehingga mendorong efektivitas dan efisiensi tata kelola dan pembangunan di desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai contoh baik bagi Kepala Desa di Provinsi Lampung untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan masyarakat, sehingga mampu merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik aparatur desa, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat.

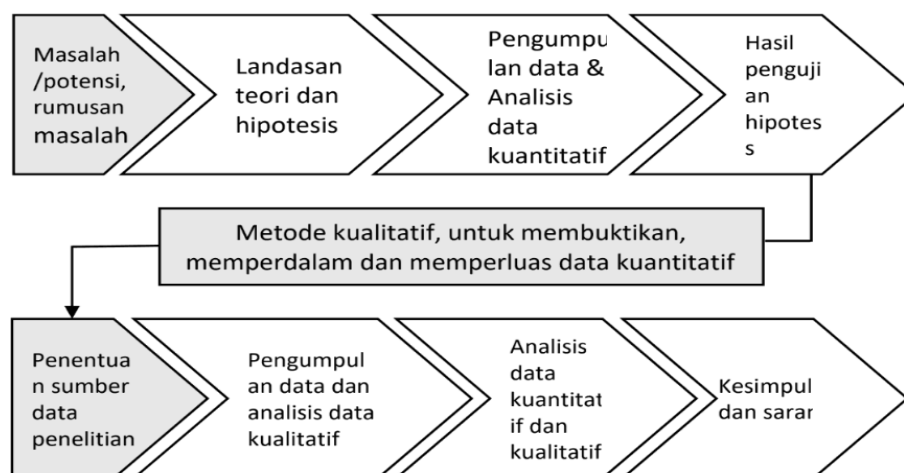
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Analisis

2.1.1 Metode Campuran (*Mixed Methods*)

Metode penelitian campuran, merupakan metode penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, untuk meneliti objek yang sama, namun dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Menurut Creswell, terdapat model penelitian campuran *sequential explanatory*, yaitu sebuah penelitian yang melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisis kualitatif guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang telah dilakukan pada tahap pertama (Azhari, Afif, Kustati, & Sepriyanti, 2023).



Gambar 2.1 Alur Model Penelitian Campuran Sequential Explanatory
Sumber: Hermawan, 2013

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap pendekatan utama, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang dirancang untuk melengkapi hasil penelitian yang lebih komprehensif.

1. Tahap Kuantitatif

Tahap awal penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pendekatan ini dilakukan dengan menyusun kuesioner yang terstruktur dan menggunakan skala pengukuran, seperti skala Likert, untuk mengumpulkan data dari responden yang relevan. Data kuantitatif ini dianalisis secara statistik untuk melihat pola, hubungan, atau pengaruh antarvariabel, seperti perilaku pengikut, efektivitas kepemimpinan kepala desa, dan pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM). Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris tentang hubungan variabel yang menjadi fokus penelitian.

2. Tahap Kualitatif

Setelah hasil kuantitatif diperoleh, penelitian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif untuk memperdalam pemahaman atas temuan yang dihasilkan. Tahap ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang konteks dan dinamika yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui data kuantitatif. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor kontekstual, mengenai gaya kepemimpinan kepala desa memengaruhi perilaku pengikut dan bagaimana pengikut berkontribusi terhadap capaian Indeks Desa Membangun.

Pendekatan dua tahap ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti (La Ode, 2018). Pendekatan kuantitatif memberikan validitas dan reliabilitas melalui data statistik, sementara pendekatan kualitatif memberikan nuansa yang lebih kaya dan detail tentang hubungan dinamis antara pemimpin dan pengikut dalam konteks pemerintahan desa. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan aplikatif.

2.2 Tinjauan Pemerintahan Desa

2.2.1 Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja (Endah, 2018). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Aswun & Kpalet, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa Menurut Pasal 26 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang desa disebut bahwa:
 - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d) Menetapkan peraturan desa;
 - e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f) Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa, mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;

- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari: Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, Pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

2.2.2 Kewenangan Desa

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Endah, 2018). Dengan menetapkan pengaturan desa sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tujuannya yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat , tradisi dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa;
5. Membentuk pemerintahan Desa yang professional , sefisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Tujuan pengaturan desa ini kemudian didukung oleh asas pengaturan Desa yang dua asasnya yaitu rekognisi dan subsidiaritas menjadi dasar penetapan kewenangan desa yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan asas desentralisasi yaitu otonomi daerah (Agisari, 2019). Asas pengaturan Desa yaitu :

1. Rekognisi , yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku didalam masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun Desa;

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijami;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Berdasarkan tujuan dan asas pengaturan desa tersebut maka dalam UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pasal 18 Desa diberikan Kewenangan meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pasal 19 menerangkan kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan local berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a dan b diatur dan diurus oleh desa (Pasal 20). Pelaksanaan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa (pasal 21). Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa (Pasal 22 ayat (1). Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya (ayat (2). Kewenangan Desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a UU Desa meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat Desa Adat.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b serta pasal 103 UU Desa diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan

kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dan huruf d UU Desa diurus oleh Desa Adat. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, Pelaksanaan pembangunan Desa Adat, peminan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat. Penugasan sebagaimana dimaksud disertai dengan biaya. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

2.3 Tinjauan Kepemimpinan Pemerintahan

2.3.1 Konsep Kepemimpinan

Menurut Rivai dalam Wicaksono (2015), kepemimpinan (*Leadership*) adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Wicaksono, 2015). Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kartono (2008:5-8) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan salah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis antara pemimpin dengan

orang-orang yang dipimpinnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Kepemimpinan atau *Leadership* dalam (Sedarmayanti, 2018), adalah :

- a. Proses dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan seorang pemimpin.
- b. Hubungan interaksi antar pengikut dengan pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Proses mempengaruhi aktivitas/perilaku kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan.
- d. Proses member arti (pengarahan berarti) terhadap usaha kolektif dan menyebabkan adanya kesediaan untuk melakukan aktivitas/perilaku yang diinginkan untuk pencapaian sasaran.
- e. Proses mempengaruhi kegiatan individu/kelompok dalam usaha mencapai tujuan pada situasi tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan, artinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi tmbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat dipandang efektif apabila dapat membujuk para pengikutnya untuk meninggalkan kepentingan pribadi mereka demi keberhasilan organisasi.

2.3.2 Kepemimpinan Pemerintahan

Secara umum kepemimpinan dapat dimaknai adalah sebuah kerangka kepemimpinan dalam pemerintahan atau secara operasional dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah penerapan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dibidang pemerintahan. Hubungan kepemimpinan pemerintahan

Indonesia terdapat pada setiap tingkat pemerintahan, Nasional/Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, kecamatan dan juga tingkat pemerintahan kelurahan/desa (Pamudji, 1995). Lebih lanjut jika pengertian ini dikaitkan dengan pemerintahan daerah maka kepemimpinan pemerintahan daerah adalah penerapan dasar-dasar kepemimpinan pada umumnya dalam sistem pemerintahan di daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Melengkapi pendapat diatas Kaloh (2009) menjelaskan bahwa berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia maka pemimpin pemerintahan adalah mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif maupun yudikatif (Kaloh, 2009). Dari sisi lain pemimpin pemerintahan dapat dibedakan menjadi pemimpin politik yang tersusun secara hirarkis mulai dari presiden yang dibantu para menteri, gubernur, bupati/Wali Kota dan kepala desa/lurah dan pemimpin yang menduduki jabatan struktural yaitu mereka yang menduduki jabatan secara berjenjang yang tersusun dari eselon I, II, III, IV. Para pejabat politik dan pejabat struktural digolongkan sebagai pemimpin pemerintahan karena mereka adalah aktor pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan maju serta mendapatkan pelayanan yang adil dan merata.

Para pemimpin pemerintahan ini harus memiliki sifat dan perilaku yang bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya, siap mengorbankan diri demi membela martabat, kehormatan dan kejayaan bangsa dan negaranya serta jauh dari sifat mementingkan diri sendiri, boros, serakah, tidak dapat mengendalikan diri, dan sombong. Dalam kaitan ini seorang pemimpin pemerintahan dituntut juga untuk mengikuti perkembangan paradigma pemerintahan, sebagaimana dipahami bahwa dewasa ini telah terjadi perkembangan paradigma dalam pemerintahan yakni bergesernya sistem pemerintahan yang digerakkan oleh Visi dan Misi, memusatkan perhatian pada keluaran (*output*) yang efisien bukan kepada masukan (kenaikan anggaran setiap tahun) yang mengarah kepada maksimalisasi masukan dibanding maksimalisasi keluaran.

Pemerintah hendaknya berperilaku seperti dunia usaha dalam hal pelayanan masyarakat. Dimana masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Selain pemerintah lebih tepat berorientasi pada mekanisme kerja partisipatif dari pada mekanisme kerja hirarkis (Osborne dan Gaebler, 2008) Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin pemerintahan merupakan figur yang menentukan keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.3 Fungsi Kepemimpinan Pemerintahan

Fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik. Selain itu, fungsi kepemimpinan juga memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan (Kartono, 2004:93).

Fungsi kepemimpinan menurut Sudriamunawar (2006:8) merupakan salah satu di antara peran administrator untuk mempengaruhi orang lain atau bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hersey dan Blanchard, dalam Rivai dan Mulyadi (2010:74), kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut adalah:

a. Fungsi Instruksi

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dilaksanakan secara efektif. Fungsi instruksi adalah kemampuan pimpinan menggerakkan orang lain agar melaksanakan perintah, yang bersumber dari keputusan yang ditetapkan.

b. Fungsi Konsultasi

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat bergantung pada pihak pemimpin dengan menjalankan fungsi konsultasi, dapat diharapkan keputusan dari pemimpin akan mendapat dukungan dan akan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berjalan efektif.

c. Fungsi Partisipasi

Fungsi ini berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

d. Fungsi Pengendalian

Fungsi ini cenderung bersifat komunikasi satu arah. Pengendalian yang dimaksud adalah kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggota bawahannya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

e. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang lain, sesuai dengan posisi atau jabatannya apabila diberi pelimpahan wewenang. Kepercayaan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

2.4 Tinjauan Gaya Kepemimpinan Pemerintahan Situasional

2.4.1 Gaya Kepemimpinan

Menurut Sedarmayanti (2009:131) berpendapat bahwa gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan

pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran tercapai atau gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan seorang pemimpin. Menurut Hasibuan (2011:162), gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci dimana seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menunjukkan kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

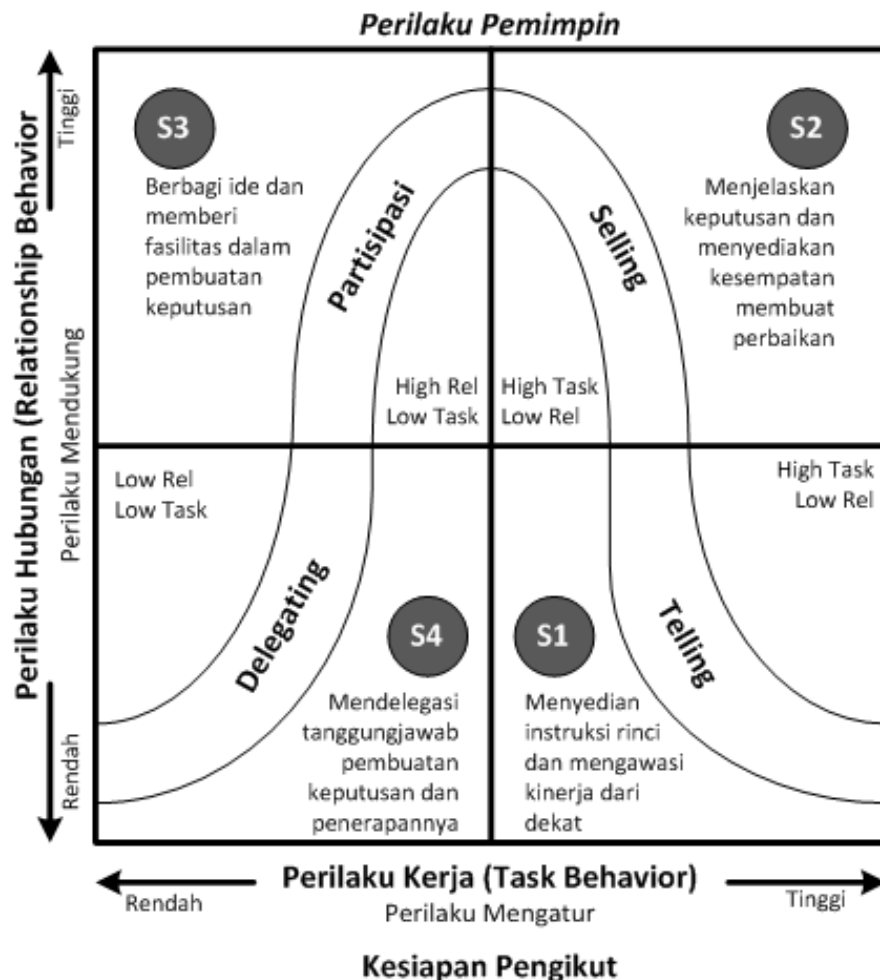
Menurut Thoha (2003:303) Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, yang tampak dan yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan kepemimpinan terhadap kemampuan bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan sifat, sikap, yang sering diterapkan pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan seseorang adalah perilaku yang dilakukan bawahan ditunjukkan oleh seorang pemimpin di dalam memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap bawahannya dengan rasa mempercayai bawahan juga memuat bagaimana cara pemimpin bekerja sama dengan bawahannya dalam mengambil keputusan, pembagian tugas dan wewenang, bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi dan bagaimana hubungan yang tercipta diantara pemimpin dan bawahannya tersebut.

2.4.2 Kepemimpinan Pemerintahan Situasional

Thoha (2015) menyatakan gaya kepemimpinan situasional terdiri dari empat gaya dasar kepemimpinan yaitu, gaya instruksi, konsultasi, partisipasi, dan delegasi. Melalui keempat gaya dasar kepemimpinan situasional tersebut pemimpin dapat

memilih cara yang paling cocok digunakan untuk membimbing pengikutnya melalui situasi yang sedang terjadi di dalam instansi atau lembaga. Dalam Sanusi (2009:22) terdapat gaya kepemimpinan yang termasuk dalam gaya kepemimpinan abad ke-21, yaitu Kepemimpinan Situasional. Kepemimpinan situasional yaitu gaya kepemimpinan yang mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi dan keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melakukan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. Kepemimpinan situasional menekankan bahwa keefektifan kepemimpinan seseorang bergantung pada pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat dalam menghadapi situasi tertentu dan tingkat kematangan jiwa bawahan.



Gambar 2.2 Kuadran Gaya Kepemimpinan Situasional
 Sumber : Hersey & Blanchard , 1996

Menurut Hersey, Blanchard, Kenneth, & Johnson (Aisyah, dkk, 2015) perilaku dan gaya kepemimpinan itu bersifat situasional. Dalam model kepemimpinan situasional, tidak ada gaya kepemimpinan yang dapat dinyatakan paling baik dari gaya kepemimpinan lainnya. Harsey dan Blanchard dalam Thoha (2012) mengembangkan gaya kepemimpinan situasional efektif dengan memadukan tingkat kematangan jiwa bawahan dengan pola perilaku yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada 4 (empat) perilaku dasar kepemimpinan situasional, yaitu:

1. Perilaku Direktif

Perilaku direktif adalah perilaku yang diterapkan apabila pemimpin dihadapkan pada tugas yang rumit dan bawahan belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut, atau pemimpin berada di bawah tekanan waktu penyelesaian, maka pemimpin akan menjelaskan apa yang perlu dikerjakan. Perilaku ini ditandai dengan komunikasi satu arah dan pembatasan peran bawahan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan semata-mata menjadi wewenang pemimpin, serta adanya pengawasan yang ketat oleh pemimpin.

2. Perilaku Konsultatif

Perilaku konsultatif adalah perilaku yang diterapkan ketika bawahan telah termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu tugas. Dalam hal ini pemimpin hanya perlu memberi penjelasan yang lebih terperinci dan membantu bawahan untuk mengerti dengan meluangkan waktu membangun hubungan yang baik dengan mereka. Pada perilaku ini pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta penetapan keputusan-keputusan dilakukan oleh pemimpin, namun dengan adanya komunikasi dua arah dan memberikan dukungan terhadap bawahan serta mau mendengar keluhan dan perasaan mereka, keputusan yang diambil tetap ada pada pemimpin.

3. Perilaku Partisipatif

Perilaku partisipatif diterapkan apabila bawahan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang dekat dengan pemimpin. Pemimpin meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan bawahan untuk lebih melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Pemimpin mendengarkan saran dan masukan dari bawahan mengenai

peningkatan kerja. Keikutsertaan bawahan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan pemimpin yang berpendapat bahwa bawahan juga memiliki kecakapan dan pengetahuan yang cukup luas untuk menyelesaikan tugas.

4. Perilaku Delegatif

Perilaku delegatif diterapkan apabila bawahan sepenuhnya paham dan efisien dalam kinerja tugas, sehingga pemimpin dapat melepaskan mereka untuk menjalankan tugasnya sendiri.

2.5 Tinjauan Perilaku Pengikut (*Follower*ship)

2.5.1 Pengertian Perilaku Pengikut

Perilaku pengikut atau followership adalah sebuah konsep yang merujuk pada peran dinamis yang dimainkan oleh pengikut dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut (Crossman & Crossman, 2011). Konsep ini menegaskan bahwa pengikut bukan hanya sekadar individu yang tunduk secara pasif terhadap otoritas pemimpin, melainkan aktor aktif yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan bersama. Crossman & Crossman melihat followership sebagai elemen kunci dalam dinamika kepemimpinan yang tidak dapat diabaikan, karena peran pengikut melampaui ketaatan semata.

Salah satu inti dari konsep ini adalah dimensi relasional yang diusungnya. Dalam hubungan pemimpin-pengikut, pengikut memiliki potensi untuk memengaruhi arah kepemimpinan melalui interaksi yang sifatnya timbal balik. Pengikut tidak hanya menerima arahan, tetapi juga mampu memberikan umpan balik kepada pemimpin, yang kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki strategi, keputusan, atau kebijakan yang diambil. Dalam beberapa kasus, pengikut bahkan dapat membentuk ulang arah kepemimpinan melalui inisiatif atau ide-ide kreatif mereka. Lebih jauh lagi, Crossman & Crossman menekankan bahwa followership bukan sekadar peran pendukung, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam efektivitas kepemimpinan.

Pengikut yang aktif dan kritis mampu memperkuat keputusan dan strategi pemimpin dengan memberikan perspektif baru atau masukan yang relevan. Hal ini menempatkan pengikut sebagai mitra strategis dalam hubungan kepemimpinan, bukan hanya subordinat. Dengan kata lain, followership adalah proses kolaboratif di mana pemimpin dan pengikut saling memengaruhi dan belajar satu sama lain. Dalam dimensi ini, pengikut tidak hanya berperan dalam membantu pemimpin mencapai visi dan misi organisasi, tetapi juga menjadi penggerak yang memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut diwujudkan dengan cara yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan. Perspektif ini menegaskan pentingnya menghargai peran pengikut dalam setiap konteks kepemimpinan, baik dalam organisasi formal maupun dalam konteks komunitas atau pemerintahan berbasis masyarakat.

2.5.2 Relasi Pemimpin dan Pengikut

Hubungan antara pemimpin dan pengikut merupakan interaksi dinamis dua arah yang saling memengaruhi. Dalam konteks ini, pengikut tidak hanya sekadar menjalankan arahan pemimpin secara pasif, tetapi juga memiliki peran aktif dalam membentuk dan mendukung efektivitas kepemimpinan. Teori followership menegaskan bahwa keberhasilan suatu kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kualitas, keterampilan, atau karisma pemimpin, melainkan juga pada bagaimana pengikut berkontribusi dalam mendukung visi, strategi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengikut yang aktif dan proaktif cenderung memberikan masukan yang konstruktif, menunjukkan inisiatif dalam menyelesaikan masalah, dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Mereka tidak hanya mengikuti arahan, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Dengan kata lain, pengikut proaktif mampu memperkuat kepemimpinan dengan cara melengkapi kekurangan pemimpin atau bahkan mengoreksi arah yang dianggap kurang efektif. Hal ini memungkinkan terciptanya hubungan yang saling mendukung dan berorientasi pada solusi.

Sebaliknya, pengikut yang pasif atau tidak kritis cenderung menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Mereka mungkin hanya mengikuti arahan tanpa memahami esensi atau tujuan dari arahan tersebut, sehingga mengurangi efisiensi

dalam implementasi kebijakan. Lebih jauh lagi, pengikut yang pasif dapat menimbulkan kesenjangan dalam komunikasi dan kurangnya inovasi, terutama ketika pemimpin membutuhkan masukan yang kritis untuk menghadapi tantangan kompleks. Dalam situasi tertentu, pengikut pasif dapat meningkatkan beban pemimpin, karena pemimpin harus mengambil keputusan sendiri tanpa dukungan penuh dari timnya.

Oleh karena itu, teori followership memberikan perspektif yang berharga dalam memahami hubungan pemimpin-pengikut sebagai simbiosis mutualisme. Dalam hubungan ini, pengikut yang berkualitas, baik dari segi kemampuan, motivasi, maupun partisipasi, akan menciptakan sinergi dengan pemimpin. Hal ini berimplikasi pada peningkatan efektivitas kepemimpinan secara keseluruhan, khususnya dalam konteks pemerintahan desa atau organisasi berbasis komunitas yang sangat bergantung pada interaksi dan kolaborasi antara pemimpin dan pengikutnya.

2.5.3 Tipologi Perilaku Pengikut

Crossman (Crossman & Crossman, 2011) menjelaskan bahwa perilaku pengikut dalam suatu organisasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipologi, masing-masing dengan karakteristik unik yang mencerminkan cara pengikut berinteraksi dengan pemimpin dan lingkungan mereka. Robert E. Kelley (Kelley, 1988) memberikan perincian mengenai tipologi perilaku pengikut, yaitu antarlain :

1. Pengikut Teladan (*Exemplary Followers*)

Pengikut jenis ini merupakan individu yang proaktif, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan secara aktif mendukung pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Mereka cenderung berorientasi pada solusi, inovatif, serta mampu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Exemplary followers bukan hanya pelaksana, tetapi juga mitra strategis bagi pemimpin, karena mereka memberikan masukan yang konstruktif dan berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan organisasi.

2. Pengikut Konformis (*Conformist Followers*)

Conformist followers adalah pengikut yang cenderung patuh terhadap arahan pemimpin tanpa melakukan banyak analisis atau berpikir kritis. Mereka menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin dan mendukung kebijakan atau keputusan yang diambil. Meskipun dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas, pengikut tipe ini sering kali kurang inovatif karena fokus mereka lebih kepada menjalankan instruksi daripada memberikan ide-ide baru.

3. Pengikut Terasing (*Alienated Followers*)

Pengikut yang tergolong dalam kategori ini memiliki kemampuan berpikir kritis, tetapi tidak terlibat secara aktif dalam mendukung pemimpin. Mereka sering kali skeptis terhadap keputusan atau arah organisasi yang dipimpin, sehingga cenderung mengambil jarak atau menunjukkan resistensi terhadap kepemimpinan. Meskipun kritik mereka dapat membantu organisasi melihat kelemahan yang ada, keterlibatan yang rendah membuat potensi kontribusi mereka tidak sepenuhnya tergali.

4. Pengikut Pasif (*Passive Followers*)

Passive followers adalah individu yang tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis maupun inisiatif. Mereka lebih cenderung mengikuti arahan pemimpin tanpa mempertanyakan kebijakan atau keputusan yang ada. Pengikut tipe ini biasanya membutuhkan banyak arahan dan pengawasan untuk menyelesaikan tugas, sehingga kurang mampu memberikan nilai tambah terhadap organisasi di luar pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.

Tipologi ini menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pengikut yang ada. Pemimpin yang memahami tipologi ini dapat menyesuaikan pendekatan kepemimpinan mereka untuk memaksimalkan potensi pengikut sekaligus mengelola tantangan yang mungkin muncul dari setiap tipe pengikut.

2.5.4 Implikasi Perilaku Pengikut Terhadap Kepemimpinan

Sejalan dengan teori kepemimpinan situasional yang menjadi kerangka dalam penelitian ini, perilaku pengikut atau followership dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual dan situasional yang beragam. Artikel ini menggarisbawahi bahwa perilaku pengikut tidak statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan:

1. Kompleksitas Tugas

Ketika tugas yang dihadapi semakin kompleks, pengikut cenderung menunjukkan perilaku yang lebih kolaboratif dan berpikir kritis. Dalam situasi ini, pengikut yang proaktif dan inovatif menjadi aset penting bagi pemimpin dalam mengidentifikasi solusi dan menyelesaikan tantangan.

2. Dinamika Kelompok

Hubungan interpersonal dalam kelompok kerja juga memengaruhi perilaku pengikut. Pengikut dapat lebih aktif berkontribusi jika kelompok memiliki atmosfer kerja yang positif, saling mendukung, dan menghargai pendapat individu.

3. Tingkat Pengalaman dan Kompetensi

Pengikut dengan tingkat pengalaman dan kompetensi yang lebih tinggi cenderung lebih percaya diri dalam berperan aktif, memberikan masukan, serta mengambil inisiatif. Sebaliknya, pengikut dengan kompetensi yang lebih rendah mungkin lebih bergantung pada arahan pemimpin.

4. Gaya Kepemimpinan yang Diterapkan

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa, seperti delegatif, partisipatif, atau direktif, juga memainkan peran kunci. Pengikut cenderung menyesuaikan perilaku mereka untuk mendukung atau merespons gaya kepemimpinan yang digunakan.

Teori followership memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika hubungan pemimpin-pengikut, terutama dalam konteks lokal seperti pemerintahan desa. Dalam skala ini, perilaku pengikut yang proaktif, kritis, dan inovatif dapat memperkuat proses pengambilan keputusan kepala desa. Selain itu, pengikut yang aktif dapat memberikan masukan yang relevan dan mendukung implementasi program pembangunan desa, sehingga meningkatkan keberhasilan program secara

keseluruhan. Dalam penelitian ini, teori followership digunakan untuk menganalisis perilaku perangkat desa sebagai pengikut kepala desa. Dengan menggunakan tipologi perilaku pengikut yang diidentifikasi, penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana perilaku pengikut memengaruhi efektivitas kepemimpinan kepala desa. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga akan menghubungkan perilaku pengikut dengan pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM), mengingat bahwa keberhasilan IDM tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga pada kontribusi pengikut yang efektif. Hal ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hubungan pemimpin-pengikut dapat memengaruhi pembangunan desa secara keseluruhan.

2.6 Tinjauan Indeks Desa Membangun

2.6.1 Indeks Desa Membangun

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, kualitas hidup manusia, dan pengentasan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, Amanah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menetapkan target berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 dan meningkatkan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000. Dalam mengukur hasil pembangunan desa untuk mencapai target tersebut, beberapa Indikator dapat digunakan salah satunya Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa merupakan indeks komposit yang terbentuk dari dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi.

Pasal 74 UU Desa menyebutkan 4 aspek yang dibutuhkan dalam pembangunan desa, yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan (Pasal 78 UU Desa). Komponen Indeks Desa Membangun meliputi 3 sub indeks dengan 54 indikator, dimana Indeks Ketahanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan, modal sosial, pemukiman) memiliki 38 indikator, Indeks Ketahanan Ekonomi memiliki 12 indikator, dan Indeks Ketahanan Lingkungan memiliki 4 indikator. Melalui Indeks Desa Membangun, kemajuan dan kemandirian desa dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Desa Mandiri (atau bisa disebut desa Sembada), memiliki indeks lebih besar dari 0,8155
- b. Desa Maju (atau bisa disebut desa pra-Sembada), memiliki indeks kurang dan sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072
- c. Desa Berkembang (atau bisa disebut desa Madya), memiliki indeks kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989
- d. Desa Tertinggal (atau bisa disebut desa pra-Madya), memiliki indeks kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907
- e. Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai desa Pratama). Kurang dan lebih kecil dari 0,4907

IDM dapat menjadi salah satu masukan (fokus) dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan strategis dan Isu-isu kunci yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, salah satunya adalah melalui perumusan RKP Desa untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

2.6.2 Indikator Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 2 Tahun 2016. IDM merupakan alat yang dikembangkan oleh Kemendes PDTT untuk mengukur tingkat perkembangan desa di Indonesia. IDM digunakan sebagai acuan untuk: Perencanaan pembangunan desa dan perdesaan, Penetapan pengalokasian dana desa, Tolok ukur kemajuan pembangunan desa. Adapun alat pengukuran

perkembangan desa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Indikator dan Domain Indeks Desa Membangun

Domain Pemerintahan	Indikator
Pemerintahan Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Waktu tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit b. Tersedia tenaga kesehatan (bidan, dokter, dll.) 2. Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> a. Akses ke pendidikan dasar SD/MI < 3 km b. Akses ke SMP/MTS < 6 km 8. Akses ke SMU/SMK < 6 km 3. Pemukiman <ol style="list-style-type: none"> a. Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak b. Akses air bersih untuk mandi dan mencuci c. Keluarga yang telah memiliki aliran listrik d. Sinyal telepon seluler kuat. e. Siaran televisi lokal, nasional, asing 34. Akses internet 4. Ketahanan Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi di desa b. Tersedianya moda transportasi umum 5. Ketahanan Ekologi <ol style="list-style-type: none"> a. Keberadaan pencemaran air, tanah, udara b. Sungai yang terkena limbah c. Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan) d. Upaya mitigasi bencana alam (jalur evakuasi, peringatan dini)
Pemerintah Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Akses ke poskesdes, polindes, dan posyandu b. Tingkat aktivitas posyandu

Domain Pemerintahan	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> c. Tingkat kepesertaan BPJS 2. Pendidikan non-formal <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pemberantasan buta aksara b. Kegiatan PAUD c. Kegiatan PKBM/Paket ABC 3. Modal Sosial <ul style="list-style-type: none"> a. Kebiasaan gotong royong di desa b. Keberadaan ruang publik terbuka yang tidak berbayar c. Ketersediaan fasilitas/lapangan olahraga d. Terdapat kelompok kegiatan olahraga 4. Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> a. Akses ke Sekolah Luar Biasa b. Keberadaan penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, PSK, pengemis) c. Kasus bunuh diri di desa 5. Ketahanan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> a. Akses ke pusat perdagangan. b. Tersedianya kantor pos dan jasa logistik c. Tersedianya lembaga perbankan umum d. Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi) 6. Ketahanan Ekologi <ul style="list-style-type: none"> a. Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan) b. Upaya mitigasi bencana di desa
Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Akses ke poskesdes, polindes, dan posyandu b. Tingkat aktivitas posyandu 2. Pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia taman bacaan atau perpustakaan desa 3. Modal Sosial: <ul style="list-style-type: none"> a. Warga desa terdiri dari beberapa suku/etnis b. Warga desa berkomunikasi menggunakan bahasa berbeda

Domain Pemerintahan	Indikator
	c. Agama yang dianut mayoritas warga
	4. Rasa Aman Penduduk:
	a. Pemeliharaan poskamling
	b. Partisipasi warga dalam siskamling
	c. Tingkat kejadian perkelahian massal
	d. Penyelesaian perkelahian secara damai
	5. Kesejahteraan Sosial:
	a. Akses ke Sekolah Luar Biasa
	6. Permukiman:
	a. Mayoritas penduduk memiliki jamban
	b. Terdapat tempat pembuangan sampah
	7. Ketahanan Ekonomi:
	a. Tersedianya BPR
	b. Akses penduduk ke kredit
	c. Kehadiran usaha kedai makanan, restoran, hotel, dan penginapan
	d. Jalan desa yang dapat dilalui kendaraan sepanjang tahun
	e. Kualitas jalan desa (aspal, kerikil, tanah)

Sumber: Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, Diolah kembali oleh Peneliti, 2024.

Kepemimpinan kepala desa memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan desa, terutama dalam memastikan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ekonomi masyarakat berjalan optimal. Studi menunjukkan bahwa kepala desa dengan gaya kepemimpinan yang partisipatif dan delegatif mampu mendorong masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan, termasuk dalam mengoptimalkan program posyandu, taman bacaan, dan poskamling. Tanpa kepemimpinan yang kuat, berbagai program desa akan cenderung stagnan dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, indikator kesehatan (akses poskesdes, polindes, posyandu), pendidikan (taman bacaan/perpustakaan desa), dan

rasa aman (poskamling dan penyelesaian konflik) sangat relevan untuk dikaji karena langsung dipengaruhi oleh peran kepala desa (Jahira, Madani, & Haerana, 2023).

Kesehatan dan pendidikan merupakan dua sektor utama dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang membutuhkan peran aktif kepala desa dalam implementasinya. Keberadaan posyandu, polindes, serta perpustakaan desa sangat bergantung pada inisiatif kepala desa dalam mengalokasikan anggaran dan memberdayakan perangkat desa serta kader masyarakat. Studi terdahulu menegaskan bahwa kepala desa yang memiliki visi jelas terhadap penguatan layanan dasar akan lebih mudah menggerakkan sumber daya lokal untuk meningkatkan akses kesehatan dan literasi masyarakat. Kepemimpinan delegatif memungkinkan masyarakat, terutama kader posyandu dan kelompok pemuda, untuk turut serta dalam mengelola fasilitas ini, sehingga keberlanjutan program dapat terjaga. Oleh sebab itu, indikator kesehatan dan pendidikan menjadi elemen penting dalam penelitian ini (MISAH, RARES, & DENGO, 2019).

Keamanan dan modal sosial memiliki keterkaitan erat dengan pola kepemimpinan kepala desa, terutama dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan desa. Keberadaan poskamling, partisipasi warga dalam sistem keamanan lingkungan, serta penyelesaian konflik secara damai sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala desa. Penelitian menunjukkan bahwa kepala desa dengan gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan delegatif cenderung lebih mampu menggerakkan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di desa. Selain itu, dalam desa yang heterogen secara etnis dan agama, kepala desa berperan dalam memastikan integrasi sosial tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, indikator keamanan dan modal sosial menjadi bagian dari penelitian ini, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa (Basri, 2022)

Ketersediaan sarana sanitasi dan sistem pembuangan sampah menjadi faktor penentu kualitas hidup masyarakat desa, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada peningkatan IDM. Kepala desa memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas pembangunan desa, termasuk dalam pengadaan fasilitas sanitasi yang layak seperti jamban dan tempat pembuangan sampah. Studi terdahulu menunjukkan bahwa desa dengan kepala desa yang proaktif dalam mengelola program sanitasi dan lingkungan cenderung memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih tertata. Di sisi lain, kepemimpinan yang pasif menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, indikator permukiman (jamban dan tempat pembuangan sampah) menjadi relevan dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan efektivitas kepemimpinan kepala desa. (Hermansyah & Pasciana, 2018).

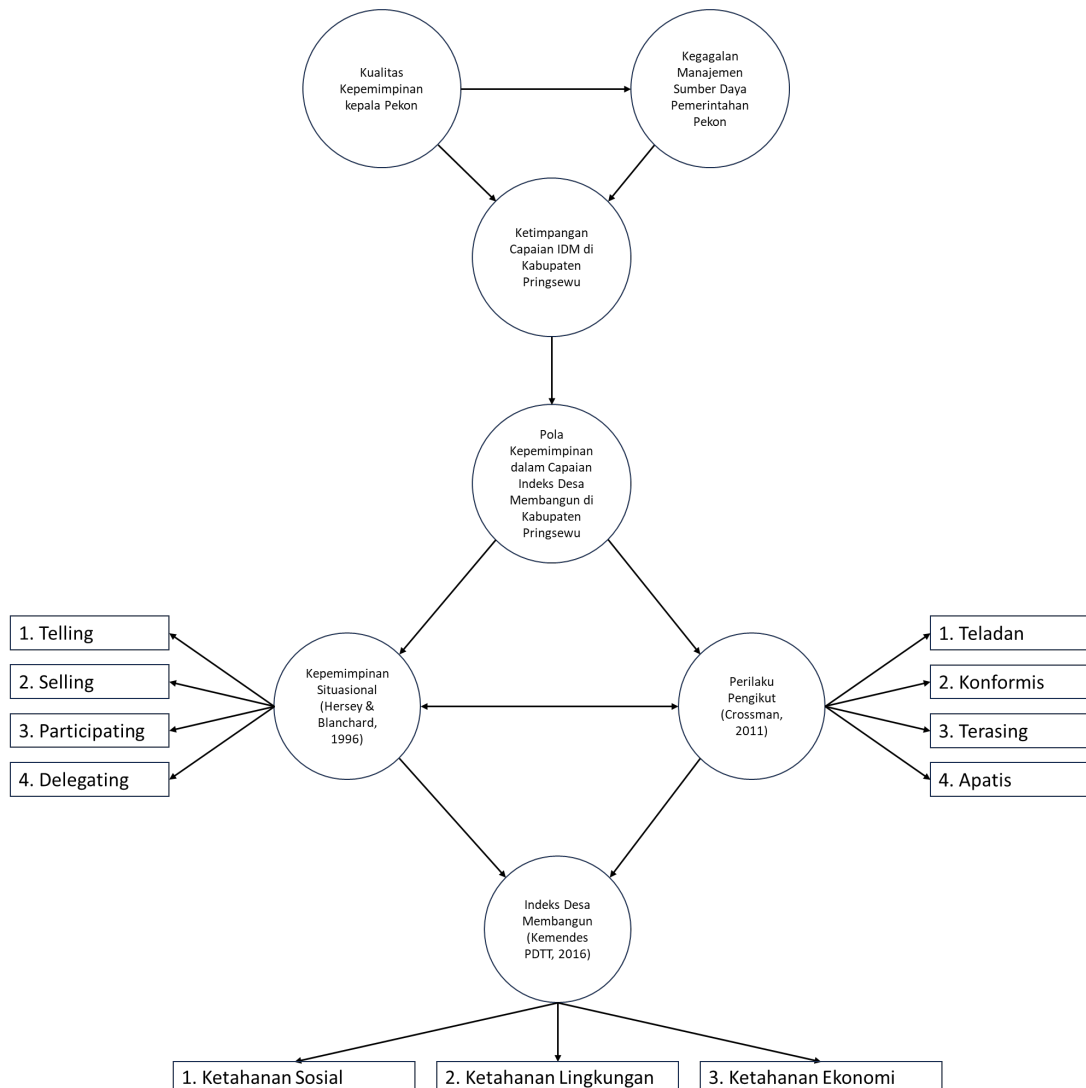
Perekonomian desa tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga pada kebijakan kepala desa dalam memfasilitasi akses permodalan dan penguatan ekonomi lokal. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), akses kredit, serta fasilitas usaha seperti kedai makanan dan penginapan sangat dipengaruhi oleh peran kepala desa dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Studi terdahulu menunjukkan bahwa kepala desa yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses kredit yang lebih mudah serta mendorong pembangunan infrastruktur jalan desa, mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, indikator ketahanan ekonomi (BPR, kredit, usaha desa, dan jalan desa) menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk memahami sejauh mana kepemimpinan kepala desa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Syafitri & Suriani, 2019).

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat batasan-batasan dalam proses penelitian agar dapat memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti. Prestasi sejumlah desa di Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di desanya, menjadi sebuah torehan baru

yang layak untuk di kaji lebih mendalam. Salah satu faktor yang berhasil membawa torehan prestasi tersebut adalah kemampuan kepala desa dalam menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan masyarakatnya.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Kepemimpinan Situasional dari Hersey, Blanchard, Kenneth, & Johnson (1996), yaitu perilaku dan gaya kepemimpinan itu bersifat situasional. Dalam model kepemimpinan situasional,

tidak ada gaya kepemimpinan yang dapat dinyatakan paling baik dari gaya kepemimpinan lainnya. Harsey dan Blanchard mengembangkan gaya kepemimpinan situasional efektif dengan memadukan tingkat kematangan jiwa bawahan dengan pola perilaku yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini, kepemimpinan situasional di cerminkan dalam 4 kuadran utama, yaitu Direktif, Konsultatif, Partisipatif, dan Delegatif. Kuadran tersebut akan menjadi indikator dalam mengidentifikasi gaya kepemimpinan Kepala Desa di Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Pemerintah desa juga memainkan peran penting dalam pengelolaan pemerintahan. Proses pemerintahan mengacu pada prinsip 9 *Good Governance*, yaitu partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan visioner. Jika prinsip-prinsip tersebut diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian turunan yang tepat dari adanya kedua teori di atas adalah tentang kepemimpinan situasional dan tata kelola dan pembangunan desa merupakan formula yang akan mengarahkan kepada pencapaian skor baik dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Kerangka pikir ini menjelaskan hubungan antara Kepemimpinan Situasional, Perilaku Pengikut, Kinerja, dan Indeks Desa Membangun (IDM). Model ini dirancang untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel tersebut dalam konteks pembangunan desa. Adapun elemen-elemen utama dari kerangka pikir ini adalah:

1. Kepemimpinan Situasional

Variabel ini mencerminkan gaya kepemimpinan kepala desa yang beradaptasi dengan kebutuhan pengikutnya. Dalam model ini, kepemimpinan situasional diukur melalui empat indikator utama (KS1, KS2, KS3, KS4), yang merepresentasikan aspek penting dalam pendekatan kepemimpinan yang fleksibel.

2. Perilaku Pengikut

Variabel ini menjelaskan respons atau perilaku masyarakat sebagai pengikut dalam menjalankan peran mereka. Perilaku ini diukur melalui sembilan

BAB III

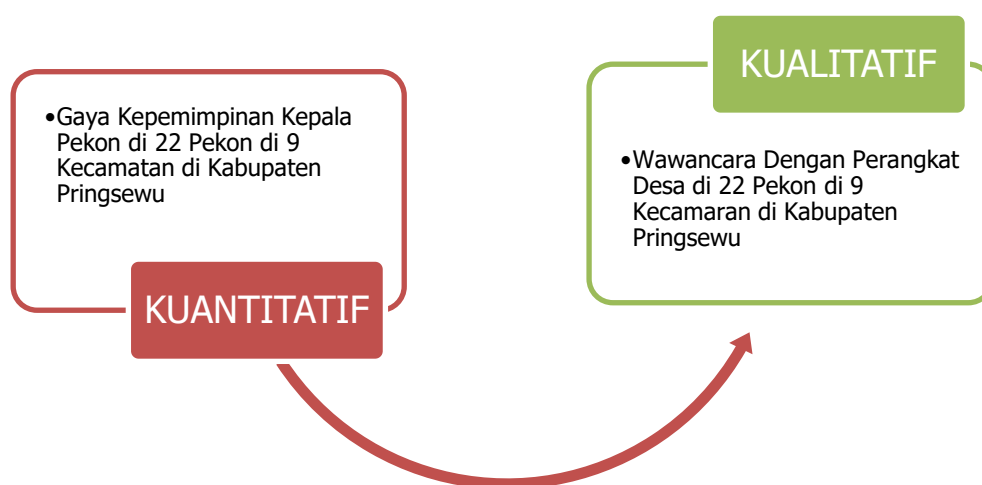
METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan observasi, wawancara atau angket mengenai keadaan sekarang ini, mengenai subjek yang sedang kita teliti (Mulyatiningsih, 2015). Melalui angket dan sebagainya kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab suatu pertanyaan. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti akan memaparkan yang sebenarnya terjadi mengenai keadaan sekarang ini yang sedang diteliti.

Sugiyono mengatakan bahwa, metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri-ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, seperti yang dikemukakan bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mengacu hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur gaya kepemimpinan kepala desa dalam keberhasilannya mewujudkan tata kelola dan pembangunan desa melalui Indeks Desa Membangun. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh gaya kepemimpinan situasional kepala desa terhadap pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM). Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden yang terpilih secara acak untuk memberikan gambaran yang representatif mengenai variabel yang diteliti.

Metode penelitian campuran merupakan jenis penelitian yang peneliti menghimpun dan menganalisis data, menggabungkan temuan, serta mengambil kesimpulan dengan memakai pendekatan atau metode kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah studi atau program penelitian tunggal (Creswell, 2018: 6). Sementara itu, desain atau tipe *sequential explanatory* dikarakterisasikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif di tahap pertama dengan bobot yang lebih besar, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif di tahap kedua (Creswell, 2018: 164).



Gambar 3.1 Desain Model *Sequential Explanatory*
 Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Metode penelitian campuran dipakai dikarenakan metode ini dapat mengumpulkan data dan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti oleh peneliti. Metode penelitian campuran merupakan pendekatan masalah penelitian yang berpusat dimana teori-teori serta metode yang digunakan instrumental. Pendekatan dalam metode penelitian campuran bergantung pada 1) mengkombinasikan desain deduktif dan induktif guna menghasilkan data baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif, dan 2) mengintegrasikan dataset dalam beberapa cara. Pendekatan ini sesuai apabila tujuan penelitian guna menjelaskan, menggambarkan, atau mengevaluasi, dan berguna guna mempelajari masalah yang kompleks (Leavy, 2022).

Kepemimpinan pemerintahan desa merujuk pada kemampuan seorang pemimpin desa (Kepala Pekon) dalam menggerakkan perangkat desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang berlandaskan nilai-nilai lokal, kebutuhan masyarakat, serta regulasi pemerintah. Konsep ini menekankan peran kepala desa sebagai administrator, inovator, dan penggerak pembangunan masyarakat desa. Menurut Widjaja, Karakteristik utama yang harus dimiliki oleh kepala desa dalam kepemimpinannya yaitu kedekatan dengan masyarakat, mampu melibatkan warga dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa, dan menggunakan nilai-nilai lokal dalam menjalankan tugas (Widjaya, 2003).

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pemerintahan desa yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat dan keterlibatan aktif para perangkat desa. Sehingga dalam penelitian ini, pendekatan kepemimpinan situasional digunakan untuk mendalami lebih lanjut pola kepemimpinan kepala desa di Kabupaten Pringsewu. Kepemimpinan Situasional, merupakan teori yang mengulas lebih dalam mengenai konsep kepemimpinan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kemampuan dan tingkat kematangan seorang pengikut (Hersey & Blanchard, 1969).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian yang dipilih dalam memilih penelitian ini, mempertimbangkan lokasi dan waktu akan membantu peneliti dalam mendalami pertanyaan penelitian. Waktu penelitian untuk penelitian ini sedang disesuaikan. Sedangkan tempat penelitian merupakan tempat yang menjadi objek penelitian. Lokasi penelitian merupakan lokasi sasaran guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini berlokasi pada 22 (dua puluh dua) Pekon dari 129 (seratus dua puluh sembilan) pekon yang ada di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Berdasarkan pendekatan atau metode yang di gunakan, Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 129 desa dan 2 kelurahan, maka di pilih 22 desa secara acak sebagai berikut :

Tabel 3.1 *Primary Sampling Unit*

KECAMATAN	POPULASI	% POPULASI	SAMPLE
Adiluwih	38,758	8.9%	2
Ambarawa	39,612	9.1%	2
Banyumas	23,300	5.3%	1
Gadingrejo	83,907	19.2%	4
Pagelaran	55,930	12.8%	3
Pagelaran Utara	16,530	3.8%	1
Pardasuka	38,027	8.7%	2
Pringsewu	87,331	20.0%	4
Sukoharjo	53,827	12.3%	3
JUMLAH	437,222	100.0%	22

Sumber : Badan Pusat Statistik Pringsewu, Diolah kembali oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan komposisi jumlah desa yang menjadi *primary sampling unit* di setiap kecamatan, kemudian di lakukan metode acak (*random sampling*) untuk memilih desa sampel di setiap kecamatan secara acak menggunakan aplikasi Minitab. Adapun nama-nama desa terpilih tersebut di muat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Lokasi Penelitian

Terpilih	Pekon	Kecamatan	Skor	Status
1	Kutawaringin	Adiluwih	0.8122	Maju
2	Bandung Baru	Adiluwih	0.8383	Mandiri
3	Ambarawa	Amabarawa	0.8622	Mandiri
4	Jati Agung	Amabarawa	0.8137	Maju
5	Banyu Urip	Banyumas	0.7454	Maju
6	Tegalsari	Gading Rejo	0.7241	Berkembang
7	Klaten	Gading Rejo	0.7444	Maju
8	Gading Rejo Timur	Gading Rejo	0.7614	Maju
9	Yogyakarta	Gading Rejo	0.7941	Maju
10	Candi Retno	Pagelaran	0.7670	Maju
11	Gumuk Mas	Pagelaran	0.7412	Maju
12	Pasir Ukir	Pagelaran	0.7040	Berkembang

Terpilih	Pekon	Kecamatan	Skor	Status
13	Way Kunir	Pagelaran Utara	0.5989	Tertinggal
14	Sidodadi	Pardasuka	0.7486	Maju
15	Sukorejo	Pardasuka	0.7028	Maju
16	Podosari	Pringsewu	0.8475	Mandiri
17	Sidoharjo	Pringsewu	0.8678	Mandiri
18	Bumi Arum	Pringsewu	0.6968	Berkembang
19	Fajar Agung	Pringsewu	0.8098	Maju
20	Sukoharjo III	Sukoharjo	0.9286	Mandiri
21	Siliwangi	Sukoharjo	0.6731	Berkembang
22	Keputaran	Sukoharjo	0.7138	Maju

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan data lokasi penelitian terpilih melalui metode pemilihan sampel *random sampling*, diketahui terdapat 22 Pekon yang tersebar di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Pemilihan sampel yang bersifat acak dengan memperhatikan komposisi persentase penduduk, di rasa cukup representatif untuk mewakili populasi yang dalam hal ini Kecamatan, terkait Pola Kepemimpinan Situasional dalam Mempengaruhi Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pringsewu.

3.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan deskripsi tipe penelitian yang menggunakan metode campuran *sequential explanatory*, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Maka variabel, parameter, dan alat pengukur yang akan digunakan dalam penelitian ini antarlain :

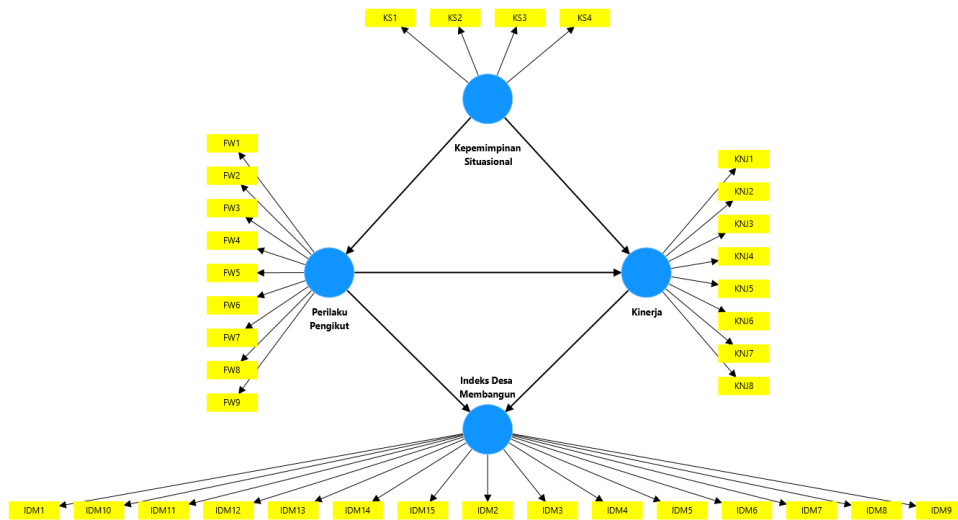
Tabel 3.3 Indikator Penelitian

Variabel	Definisi	Parameter	Alat Pengukuran	Skala
Kepemimpinan Situasional	Kepemimpinan Situasional,	Memberikan Perintah	Kuisisioner	Interval

Variabel	Definisi	Parameter	Alat Pengukuran	Skala
	merupakan teori yang di mengulas lebih dalam mengenai konsep kepemimpinan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kemampuan dan tingkat kematangan seorang pengikut (Hersey & Blanchard, 1969).	Kesempatan Pengembangan Diri Mendorong Partisipasi Delegasi		
Perilaku Pengikut	Bagaimana kepemimpinan mempengaruhi cara pengikutnya berinteraksi dengan pemimpin dan lingkungan mereka (Crossman, 2011).	Pengikut Teladan Pengikut Konformis Pengikut Terasing Pengikut Pasif	Kuisisioner	Interval
Indeks Desa Membangun	Merupakan alat yang dikembangkan oleh Kemendes PDTT untuk mengukur tingkat perkembangan desa di Indonesia. (Kemendes PDTT, 2016)	Indeks Ketahanan Ekonomi Indeks Ketahanan Lingkungan Indeks Ketahanan Sosial	Kuisisioner	Interval

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Adapun model penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Grafik 3.1 Model Penelitian

Sumber : *Diolah* Peneliti, 2024

Model penelitian ini berfokus pada hubungan antara Kepemimpinan Situasional, Perilaku Pengikut, Kinerja, dan Indeks Desa Membangun (IDM). Elemen kepemimpinan situasional terdiri dari indikator-indikator yang merepresentasikan gaya kepemimpinan kepala desa yang disesuaikan dengan kondisi pengikut dan situasi di desa. Elemen perilaku pengikut menggambarkan tingkat respons dan keterlibatan pegawai Pekon dalam mendukung kebijakan atau arahan dari Kepala Pekon. Elemen ini turut merefleksikan hasil kerja yang dicapai oleh aparatur Pekon, yang diukur berdasarkan indikator menurut tipologi perilaku pengikut.

Model penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar hubungan dan pengaruh antar variabel penelitian, memperoleh hipotesis sebagai berikut :

1. H_1 : Kepemimpinan Situasional berpengaruh positif terhadap Perilaku Pengikut;
2. H_2 : Kepemimpinan Situasional berpengaruh positif terhadap Kinerja;
3. H_3 : Perilaku Pengikut berpengaruh positif terhadap Kinerja;
4. H_4 : Kinerja berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun (IDM);
5. H_5 : Perilaku Pengikut berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang menjadi tujuan utama penelitian ilmiah. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam maka perlu dilakukan pemilihan fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan situasional kepala desa terhadap pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM), yang di analisis dengan menggunakan teori Hersey, Blanchard, Kenneth, & Johnson (1996). Kepemimpinan situasional merupakan konsep di mana seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi untuk mencapai efektivitas maksimal.

3.5 Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling*. Proses ini melibatkan pemilihan secara acak desa-desa dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan pertimbangan komposisi populasi penduduk perkecamatan. Pada penelitian ini, sampel yang menjadi objek penelitian adalah 22 Pekon yang tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Responden utama dari penelitian ini adalah 5 (lima) orang Perangkat Pekon berdasarkan peran dan jabatan yang variatif, terdiri dari Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Staff Kantor Pekon.

Tabel 3.4 Informan Penelitian

No	Jenis/Kriteria Informan	Alasan
1.	Perangkat Pekon	Informan dari kalangan perangkat pekon, termasuk sekretaris pekon, kepala dusun, staff kantor pekon, anggota kaur, kepala dusun, dll. Pemilihan narasumber bertujuan untuk memberikan perspektif yang ajeg mengenai pola kepemimpinan situasional Kepala Pekon dalam mempengaruhi dan dan mencapai skor Indeks Desa Membangun (IDM).

3.6 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pemilihan jenis data ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan akurat mengenai kepemimpinan situasional kepala desa dan dampaknya terhadap pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM). Berikut adalah deskripsi rinci mengenai jenis data yang digunakan: Data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara dan penyebaran kuisisioner, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber. Sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2017), data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti melalui instrumen penelitian yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup hasil wawancara mendalam dan kuisisioner survey.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini dapat berupa dokumen, laporan, dan publikasi yang relevan dengan penelitian. Menurut Sekaran & Bougie (2016), data sekunder membantu peneliti untuk memahami konteks dan latar belakang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Publikasi laporan Indeks Desa Membangun (IDM) Nasional Tahun 2023.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2014: 224). Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai gaya kepemimpinan kepala desa dan dampaknya terhadap pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM). Oleh karena itu penulis menggunakan berbagai

macam teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan, diantaranya:

1. Survei

Survei merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden. Menurut Groves et al. (2009), survei adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan data kuantitatif dari populasi yang besar. Dalam penelitian ini, survei dilakukan untuk mengumpulkan data dari masyarakat desa mengenai persepsi mereka terhadap gaya kepemimpinan kepala desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Kuesioner yang digunakan dirancang dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur berbagai aspek kepemimpinan dan indikator IDM.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog untuk tujuan tertentu. Dialog dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan (narasumber) (Moleong, 2014: 186). Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan; Terkait penelitian ini, peneliti menggunakan Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan kontekstual. Menurut Creswell (2014), wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman subjek penelitian secara lebih detail. Dalam konteks penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk memahami bagaimana kepala desa menerapkan gaya kepemimpinan situasional dalam tata kelola desa dan bagaimana hal ini mempengaruhi pencapaian IDM.

3. Observasi

Menurut Sarwono (2006: 224), “Observasi adalah mengamati lokasi dan secara sistematis mencatat objek atau subjek penelitian. Kegiatan observasi meliputi observasi kejadian, tingkah laku, objek yang diteliti, dan penunjang untuk penelitian yang sedang berlangsung”. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan. Adapun yang menjadi objek pengamatan

dalam penelitian ini adalah tentang sikap Pemuda Muhammadiyah terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat pada partai politik. Hal-hal lain dicatat secara sistematis. Dalam penelitian ini peneliti memilih observasi *non partisipant* untuk mengumpulkan data. Melalui observasi *non partisipant* peneliti memperoleh data lain sebagai pelengkap sumber data utama. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati praktik kepemimpinan kepala desa dalam berbagai kegiatan desa, seperti rapat desa, pelaksanaan program pembangunan, dan interaksi dengan masyarakat.

4. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Menurut Bowen (2009), studi dokumen memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang sudah tersedia dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan terhadap laporan IDM, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Dokumen-dokumen ini memberikan informasi mengenai indikator-indikator IDM, kebijakan terkait pembangunan desa, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya mengenai kepemimpinan situasional.

3.8 Teknik Pengolahan Data

Tahap tahapan yang dilaksanakan setelah pengumpulan data adalah tahap pengolahan data (Miles dan Huberman, 2014). Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat lunak statistik untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian. Berikut adalah teknik pengolahan data yang digunakan:

1. Pengacakan Populasi Untuk Menentukan Sampel

Untuk memperoleh sampel calon informan atau narasumber, peneliti menggunakan aplikasi Minitab. Minitab adalah perangkat lunak statistik yang sering digunakan untuk analisis data dan pengacakan sampel. Menurut Montgomery (2012), Minitab menyediakan berbagai fitur yang memudahkan proses pengacakan sampel dan analisis statistik. Dalam penelitian ini, Minitab digunakan untuk mengacak sampel dari populasi desa di Kabupaten Pringsewu

dan menentukan desa yang akan dijadikan lokasi survei. Dengan menggunakan Minitab, proses pengacakan sampel dilakukan secara objektif dan sistematis, sehingga menghasilkan sampel yang representatif.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS). Menurut Field (2013), SPSS menyediakan berbagai teknik analisis data yang dapat digunakan untuk mengukur indikator dan variabel penelitian. Dalam penelitian ini, SPSS digunakan untuk menganalisis data survei dan menghitung statistik deskriptif, korelasi, dan regresi. SPSS membantu peneliti dalam mengorganisasi dan menganalisis data kuantitatif dengan akurasi tinggi. Peneliti juga menggunakan aplikasi *Smart Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (SmartPLS). SmartPLS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis jalur dan uji model struktural. Menurut Hair et al. (2014), SmartPLS sangat efektif untuk menguji hubungan antar variabel laten dan mengukur pengaruh ρ_A dan koefisien jalur. Dalam penelitian ini, SmartPLS digunakan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan situasional kepala desa terhadap pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM). SmartPLS memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan kompleks mengenai hubungan antar variabel.

3. Teknik Penyajian Data

Untuk menyajikan data hasil penelitian, peneliti menggunakan aplikasi *Google Colaboratory*, adalah platform berbasis *cloud* yang memungkinkan peneliti untuk menjalankan kode *Python* dan menghasilkan visualisasi data. Menurut Bisong (2019), *Google Colaboratory* menyediakan berbagai pustaka visualisasi seperti Matplotlib, Seaborn, dan Plotly yang dapat digunakan untuk membuat grafik dan diagram. Dalam penelitian ini, *Google Colaboratory* digunakan untuk menyajikan hasil analisis data dalam bentuk grafik yang informatif dan mudah dipahami. Dengan *Google Colaboratory*, peneliti dapat membuat visualisasi data yang menarik dan membantu dalam interpretasi hasil penelitian.

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk membantu peneliti mencapai kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan secara sistematis merangkum data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dibagikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Teknik analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis, menjawab pertanyaan penelitian, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak statistik. Berikut adalah deskripsi dan analisis lebih mendalam mengenai teknik analisis data yang digunakan:

1. Persiapan Data

a. *Cleaning Data*

Proses pembersihan data dilakukan untuk memastikan data yang akan dianalisis bebas dari kesalahan dan inkonsistensi. Menurut Kothari (2004), data cleaning adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas data yang akan digunakan dalam analisis.

b. Transformasi Data

Data yang telah dibersihkan kemudian ditransformasikan sesuai dengan kebutuhan analisis. Transformasi data meliputi pengkodean variabel, normalisasi data, dan penanganan missing values.

2. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang dikumpulkan. Menurut Pallant (2010), statistik deskriptif meliputi ukuran pemusatan (*mean, median, mode*) dan ukuran penyebaran (*standar deviasi, varians*). Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden dan distribusi variabel penelitian.

3. Uji Realibilitas dan Validitas

a. Realibilitas

Reliabilitas instrumen penelitian diuji untuk memastikan konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran. Menurut Creswell (2014), uji reliabilitas dapat dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Nilai Cronbach's Alpha yang tinggi menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik.

b. Validitas

Validitas instrumen penelitian diuji untuk memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat diuji menggunakan validitas konstruk, validitas isi, dan validitas kriteria.

4. Analisis Inferensial

a. Regresi Linear

Regresi linear digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen (gaya kepemimpinan situasional kepala desa) dan variabel dependen (pencapaian IDM). Menurut Gujarati (2004), analisis regresi linear membantu dalam memahami seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

b. Analisis Jalur

Analisis jalur digunakan untuk menguji model hubungan antara variabel laten dalam penelitian. Menurut Hair et al. (2014), analisis jalur membantu dalam memahami hubungan kausal antara variabel dan menguji model struktural yang telah ditetapkan.

5. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji T digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau lebih. Menurut Field (2013), uji T membantu dalam menguji hipotesis mengenai perbedaan signifikan antara variabel penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai Pola Kepemimpinan Situasional Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu, maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Situasional Berdampak Positif pada Kinerja dan IDM Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan situasional kepala pekon memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku pengikut (dengan nilai path coefficient sebesar 0.556) dan kinerja aparatur (0.496). Efek tidak langsung melalui kinerja juga berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan nilai kontribusi total yang cukup besar (0.531 dari kinerja dan 0.39 dari perilaku pengikut).
2. Perilaku Pengikut Mendukung Keberhasilan Program Desa Perilaku pengikut dengan kontribusi koefisien sebesar 0.429 terhadap kinerja dan 0.39 terhadap IDM menunjukkan bahwa dukungan masyarakat memainkan peran penting. Desa dengan perilaku pengikut yang aktif, seperti Podosari dan Sidoharjo, memiliki skor IDM tinggi (0.8475 dan 0.8678) dan termasuk kategori Mandiri.
3. Tingkat Kinerja Berhubungan dengan IDM Desa dengan kinerja tinggi, seperti Sukoharjo III (Skor IDM 0.9286, Skor Kepemimpinan Situasional 4.0) dan Kutawaringin (Skor IDM 0.8122, Skor Kepemimpinan Situasional 3.9), berhasil masuk kategori Mandiri. Sebaliknya, Way Kunir memiliki status IDM Tertinggal (Skor IDM 0.5989, Skor Kepemimpinan Situasional 1.3). Hal ini menunjukkan hubungan erat antara kinerja aparatur desa dan capaian pembangunan desa.

4. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Adiluwih memiliki skor tertinggi sebesar 3.85, yang mencerminkan gaya kepemimpinan *delegating*, di mana kepala pekon memberikan kepercayaan penuh kepada pengikut untuk melaksanakan tugas secara mandiri. Kecamatan Pagelaran Utara dengan skor 1.30 berada dalam kategori *telling*, menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang sangat instruktif, dengan peran dominan kepala pekon dalam mengarahkan pengikut. Kecamatan lain seperti Sukoharjo 2.72 berada pada kategori *participating*, yang mencerminkan kolaborasi aktif antara kepala pekon dan pengikut dalam proses pengambilan keputusan. Kecamatan Pagelaran dengan skor 1.7 berada di rentang *selling*, mencerminkan gaya kepemimpinan yang berfokus pada komunikasi dan persuasi untuk mendukung pengikut.
5. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Pringsewu memiliki kecenderungan perilaku pengikut *Konformis*, yaitu perilaku pengikut yang cenderung cenderung patuh terhadap arahan pemimpin tanpa melakukan banyak analisis atau berpikir kritis. Mereka menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin dan mendukung kebijakan atau keputusan yang diambil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian dan penarikan kesimpulan mengenai Pola Kepemimpinan Situasional Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu, maka saran yang dapat di berikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan variasi yang signifikan dalam kepemimpinan, perilaku pengikut, dan capaian IDM di berbagai pekon. Pekon dengan skor IDM lebih tinggi umumnya memiliki kombinasi nilai tinggi dalam kepemimpinan dan perilaku pengikut, yang mencerminkan hubungan erat antara gaya kepemimpinan situasional dan kinerja desa. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kepemimpinan untuk mendorong capaian pembangunan desa yang lebih baik di Kabupaten Pringsewu.

2. Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kepala Pekon Berdasarkan temuan bahwa kepemimpinan situasional memberikan dampak signifikan pada perilaku pengikut dan kinerja, disarankan adanya pelatihan kepemimpinan adaptif bagi kepala pekon. Program ini dapat difokuskan pada desa dengan kepemimpinan rendah seperti Gumuk Mas (skor kepemimpinan 1.5).
3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Kinerja Desa Partisipasi masyarakat di desa dengan perilaku pengikut rendah, seperti Way Kunir dan Siliwangi, perlu ditingkatkan melalui forum musyawarah yang lebih inklusif. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mendukung program desa.
4. Peningkatan Kompetensi dan Sarana Aparatur Desa seperti Pagelaran Utara dan Bumi Arum, yang memiliki skor kinerja rendah (1.3 dan 2.0), memerlukan program pelatihan khusus dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Penyediaan fasilitas kerja yang lebih baik juga perlu diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agisari, Rachmi. (2019). Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.
- Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. h. J., & Barki, K. (2023). Implementasi Pendekatan Community Empowerment untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 65-76.
- Amran, H. (2023). Collaborative Process Dalam Mengelola Objek Wisata Alam Mendatte Park di Kabupaten Enrekang= Collaborative Process in Managing Mendatte Park Natural Tourism Objects in Enrekang Regency. Universitas Hasanuddin.
- Andarista, M. V., & Kriswibowo, A. (2023). Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Inovasi Pembangunan Desa Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 8(1), 1-23.
- Aswun, Damar, & Kpalet, Petrus. (2022). ERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA KOJA DOI. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 3(11), 31-35.
- Azhari, Devi Syukri, Afif, Zihnil, Kustati, Martin, & Sepriyanti, Nana. (2023). Penelitian mixed method research untuk disertasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 8010-8025.
- Basri, Muhamad. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pringsewu.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Crossman, Brian, & Crossman, Joanna. (2011). Conceptualising followership—a review of the literature. *Leadership*, 7(4), 481-497.
- Damanik, S. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Endah, Kiki. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76-82.
- Fadlan, F. (2019). Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman. *Soumatara Law Review*, 2(1), 43-61.

- Fornell, C. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Publications Sage.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook: Springer Nature.
- Hariri, A. (2018). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253-266.
- Hermansyah, Asep, & Pasciana, Rostiena. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 1-11.
- Hersey, Paul, & Blanchard, Kenneth H. (1969). Management of organizational behavior: Utilizing human resources: Academy of Management Briarcliff Manor, NY 10510.
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jahira, Jahira, Madani, Muhlis, & Haerana, Haerana. (2023). PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TONGKONAN BASSE KABUPATEN ENREKANG. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(2), 368-384.
- Kadi, Y. B., & Rahmanto, A. (2020). F. KEBIJAKAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN KENJERAN, KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA). *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*, 3(2), 52-52.
- Kaloh, Johan. (2009). Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola kegiatan kekuasaan dan perilaku kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah).
- Kelley, RE. (1988). In praise of followers. *Harvard Business Review*.
- La Ode, Hasiara. (2018). Penelitian Multi Kasus dan Multi Situs. Penerbit IRDH, Malang Jawa Timur ixxiint, 276.
- Leavy, Patricia. (2022). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches: Guilford Publications.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1-21.

- Marpaung, O. K. D. (2017). Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- MISAH, MEILANY, RARES, JOYCE JACINTA, & DENGO, SALMIN. (2019). Pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap pelaksanaan program pembangunan di Desa Mala Timur Kecamatan Melonguane. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(76).
- Moonti, R. M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 26-37.
- Muktamar, A., Yassir, B. M., Syam, W. S., & Ningsi, S. W. (2024). Hubungan Gaya Kepemimpinan Dan Manajemen Sumber Daya Manusia. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 181-190.
- Mulyatiningsih, Endang. (2015). Metode penelitian terapan bidang pendidikan: Uny Press.
- Pangestu, F. P., Rahmadianti, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan.
- Pamudji, Suparni. (1995). Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia.
- Putri, A. S., Febriyanti, D., & Amaliatulwalidain, A. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Desa Sungai Kedukan. *Journal of Social and Policy Issues*, 140-145.
- Ramadhan, R. R., Alfianingrum, D., Maharani, S. A., & Harmawan, B. N. (2024). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA BANJARSARI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 668-677.
- Rikza, M. Z., Mahsun, T., Ridwan, M. F., & Anshori, M. I. (2023). Pendekatan Situasional. *Jurnal Manajemen Kreatif dan Inovasi*, 1(3), 123-136.
- Saragih, R. (2017). Membangun usaha kreatif, inovatif dan bermanfaat melalui penerapan kewirausahaan sosial. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2), 26-34.
- Sarstedt, M. (2019). Revisiting hair et al.'s multivariate data analysis: 40 years later The Great Facilitator: Reflections on the Contributions of Joseph F. Hair, Jr. to Marketing and Business Research (pp. 113-119): Springer.
- Sedarmayanti, Hj. (2018). Manajemen sumber daya manusia; reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil: Reflika Aditama.
- Setianingias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 61-74.
- Silalah, U. (2023). Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: uwais inspirasi indonesia.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.

- Supriadi, D. (2021). Kepimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Ganec Swara*, 15(1), 921-928.
- Susiana, S. (2015). Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan: P3DI Setjen DPR.
- Syafitri, Indrian, & Suriani, Lilis. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Wicaksono, Inderawan. (2015). PERANCANGAN SISTEM UNTUK MENGATASI KONFLIK ANTARA PIMPINAN DAN KARYAWAN DENGAN MENGGUNAKAN KNOWLEDGE MANAGEMENT DAN INSENTIF PADA PT. DUTA BANGUN KREASINDO. Tesis Program Magister Management Universitas Widyatama.
- Widjaya, AW. (2003). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh.